

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

2025

PENYUSUN

Laporan Kinerja
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik 2025

Penanggung Jawab

Antonius Bambang Wijanarto
Lien Rosalina
Gatot Haryo Pramono
Dheny Trie Wahyu Sampurno

Tim Penyusun

Lalitya Narieswari
Chintia Dewi
Ninuk Christina Anggraeni
Sri Eka Wati
Yusuf Wibisono
Diah Retno Minarni
Sri Hartini
Niendyawati
Th. Retno Wulan
Erna Kusumawati
Wulan Yustia Sahroni
Izzuddin Abdul Aziz
Almira Rahma
Rizal Nafis Elfahdi
Maulida Iffani
Fathimah Nur Lestari
M. Adnan Shafry Untoro
Bety Puspitasari
Wahyu Lazuardi
Dimas Prawira
Adinda Cempaka
Imas Midita
Alvio Yustian Rifai
Adriansyah

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

Cibinong, 30 Januari 2026

Penanggung Jawab Kegiatan

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik



Dr. Antonius Bambang Wijanarto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT), Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Deputy Bidang IGT Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang IGT dan untuk memberikan gambaran/informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang harus dan telah dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

LAKIN ini disusun berdasarkan data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama. Kondisi tersebut untuk mendapatkan gambaran riil pelaksanaan program dan kegiatan di Kedeputian Bidang IGT Tahun Anggaran 2025.

Deputy Bidang IGT merupakan salah satu unsur pelaksana teknis di Badan Informasi Geospasial (BIG) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, koordinasi, dan pengelolaan IGT secara nasional. IGT memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, maupun masyarakat luas.

Untuk perbaikan yang berkelanjutan saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bahu membahu menyusun LAKIN ini. Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja khususnya Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik dan BIG secara umum di masa mendatang.



Deputy Bidang

Informasi Geospasial Tematik



Dr. Antonius Bambang Wijanarto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas utama Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik adalah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) kepada penyelenggara IGT dan pembinaan pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) kepada pengguna IG. Selain itu, mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengintegrasikan lebih dari satu IGT yang belum diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik berperan penting memastikan IGT yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah memenuhi prinsip satu referensi, satu standar, satu basis data, satu geoportal sesuai amanat pada Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Satu Data Indonesia (SDI). Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik melakukan langkah strategis dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik untuk mewujudkan dan menjawab kebutuhan di atas dengan optimal. Renstra Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik merujuk pada Renstra Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2025-2029.

Langkah strategis dan terukur yang dilaksanakan, menjadi tolok ukur capaian kinerja Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2025. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik kepada Kepala BIG. Capaian kinerja Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik pada Tahun 2025 mendukung pencapaian visi BIG yaitu **"Terwujudnya Ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang Inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Penguatan Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045"**, serta misi BIG yaitu

1. Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan;
2. Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di Berbagai Bidang; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi Menuju Indonesia Emas.

LAKIN memuat pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 7.558.804.000,- Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyusun 4 (empat) target pada sasaran program Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik. Capaian kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik pada Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik dalam melaksanakan langkah strategis dan terukur yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2025 :

- Sasaran Program (SP) :
 1. Sasaran Program 2.2 Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia,
 2. Sasaran Program 2.9 Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial
 3. Sasaran Program 2.1 Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial
- SP terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu :
 1. IKP 2.2.1 Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat
 2. IKP 2.9.1. Indeks Pelayanan Publik,
 3. IKP 2.10.1 Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial,
 4. IKP 2.10.2 Indeks Literasi Geospasial Indonesia.

Kode IKP	Target Awal	Revisi Target	Realisasi	Capaian
IKP 2.2.1	17%	10%	10,39%	103,9%
IKP 2.9.1	4,4 (Skala 1-5)	4,4 (Skala 1-5)	4,45	101,13%
IKP 2.10.1	17%	20%	28%	140%
IKP 2.10.2	2,1 (Skala 1-4)	2,1 (Skala 1-4)	2.95	140,47%

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi sasaran program yang dicerminkan dari pencapaian realisasi anggaran sebesar 92.67%.

DAFTAR ISI

PENYUSUN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas	2
1.2.3 Fungsi	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA	4
1.5 ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIG 2025-2029	13
2.2 RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG IGT 2025-2029	14
2.2.2 Visi dan Misi	16
2.2.3 Tujuan	17
2.3 POHON KINERJA	18
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	20
2.5 RENCANA KERJA TAHUN 2025	22
2.6 METODE PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG IGT TAHUN 2025	35

3.1.1 Capaian Kinerja 2025 Dibandingkan Tahun Sebelumnya.....	42
3.1.2 Capaian Kinerja 2025 Dibandingkan Dengan Target Rencana Strategis 2025-2029	43
3.1.3 Realisasi dan Evaluasi Kinerja Dibandingkan Terhadap Internal BIG/Nasional/Internasional.....	49
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	59
3.2.1 SASARAN PROGRAM.....	60
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	81
3.3.1 PENGANGGARAN.....	81
3.3.2 PELAPORAN KEUANGAN	83
3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA KEUANGAN	86
3.5 KINERJA LAIN-LAIN.....	87
3.5.1 Monitoring dan Evaluasi Deputi IGT	87
3.5.2 Integrasi Informasi Geospasial Tematik untuk Penguasaan Lahan.....	88
Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan	88
3.5.3 Integrasi Pertambangan dan Kawasan Hutan.....	89
3.5.4 Penyusunan Rencana Aksi Informasi Geospasial (Renaksi IG)	89
3.5.5 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik: Tema Pengentasan Kemiskinan.....	90
3.5.5 Reward and Punishment.....	90
3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Unit Kerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2025	94
BAB IV PENUTUP	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 pada 1 Juli 2024	4
Gambar 1.2 SDM Kedeputan Bidang IGT berdasarkan jabatan	5
Gambar 1.3 SDM Kedeputan Bidang IGT berdasarkan pendidikan	6
Gambar 1.4 SDM Kedeputan Bidang IGT berdasarkan pangkat dan golongan	8
Gambar 2.1 Keterkaitan Visi BIG 2025—2029 dengan RPJMN Tahun 2025—2029 dan.....	14
Gambar 2. 2 Pohon kinerja DIGT Tahun 2025	19
Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Deputi IGT	21
Gambar 3.1 Fifth Plenary Meeting of the High-Level Group on the United Nations-Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF) di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi	52
Gambar 3. 2 Executive Board (EB) meeting of the Regional Committee of the United Nations on Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP), Deqing, China	53
Gambar 3.3 Fifteenth session of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UNGGIM) di Amerika Serikat	54
Gambar 3.4 14th Plenary Meeting of UN-GGIM-AP	56
Gambar 3.5 Expert Consultation and Meeting on Enhancing Geospatial Information.....	57
Gambar 3.6 Kontribusi pada kegiatan UN of Expert on Integration Statistical and Geospatial Information	59
Gambar 3.7 Kegiatan IGT Penugasan pada Direktorat Pemetaan Tematik	65
Gambar 3.8 Pelaksanaan Uji Pemaknaan Atlas Taktual dan Rilis Peta NKRI	67
Gambar 3. 9 Halaman Sampul Buku Atlas	67
Gambar 3.10 Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan pelayanan di BIG	76
Gambar 3. 11 Keputusan Menteri PAN RB terkait Hasil Evaluasi PEKPP	77
Gambar 3. 12 Lampiran Daftar Pegawai Inspiratif yang Lolos Tahap II.....	93

Gambar 3. 13 Nota Dinas Pemberian Reward and Punishment di Kedeputian IGT94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan jabatan	5
Tabel 1.2 SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan tingkat pendidikan	6
Tabel 1.3 SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan pangkat dan golongan	7
Tabel 1. 4 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	9
Tabel 2.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target 2025-2029.....	15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Deputi IGT Tahun 2025	20
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Program 2.2.1	22
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Program 2.9.1	26
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Program 2.10.1	29
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Program 2.10.2	30
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 DIGT	35
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Sasaran Program Deputi Bidang IGT Tahun 2024 dan 2025	42
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Program Deputi Bidang IGT Tahun 2025 dengan Rencana Strategis	43
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 DIGT.....	60
Tabel 3.5 Pagu Alokasi Anggaran Deputi Bidang IGT Per Rincian Output Tahun 2025	81
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran DBIGT per Rincian Output TA 2025.....	84

BAB 1 PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur kewajiban pimpinan Kementerian Negara/Lembaga sebagai Entitas Akuntabilitas Unit Organisasi untuk menyusun, menyajikan, serta melaporkan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi secara terukur dan transparan. Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan SAKIP yang mencakup rangkaian aktivitas mulai dari penetapan tujuan dan sasaran, pengukuran kinerja, pengelolaan data, sampai pada penyusunan laporan yang menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, tata cara pelaporan kinerja, serta mekanisme revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memastikan informasi kinerja yang disajikan andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengaturan ini, LAKIN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen manajerial untuk menganalisis keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan perbaikan kinerja berkelanjutan di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIN Deputy Bidang IGT Tahun 2025 merupakan penilaian dan evaluasi atas kinerja Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang IGT kepada Kepala BIG terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. LAKIN ini merupakan implementasi pelaporan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memuat capaian kinerja Deputy Bidang IGT pada tahun anggaran 2024. Capaian kinerja dihitung berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang IGT 2020-2025 dan Perjanjian Kinerja DIGT 2025.

LAKIN Deputy Bidang IGT menyajikan capaian sasaran program yang telah disepakati dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dalam hal ini, PK berfungsi sebagai penjabaran visi dan misi Deputy Bidang IGT yang memuat penugasan dari pimpinan kepada unit-unit di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai. Isi LAKIN Deputy Bidang IGT tidak hanya menyoroti keluaran (output) yang dihasilkan, tetapi juga menekankan hasil (outcome) atau manfaat nyata dari output tersebut bagi pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu,

Deputi Bidang IGT menyusun perencanaan program secara matang, melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara ketat dan sistematis, serta melaksanakan penerapan atau uji coba produk untuk menilai tingkat kemanfaatannya.

Program-program yang pada tahun sebelumnya telah terbukti memiliki outcome atau manfaat yang jelas kemudian dilanjutkan pada tahun 2025, dengan fokus untuk terus mendorong peningkatan atau penambahan nilai kemanfaatan yang dihasilkan. Dengan demikian, LAKIN Deputi Bidang IGT menjadi sarana strategis untuk memastikan bahwa setiap program tidak hanya selesai dilaksanakan, tetapi juga memberikan dampak positif yang semakin besar dari waktu ke waktu.

Capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat menjadi salah satu program prioritas Deputi Bidang IGT sekaligus dijaga keberlanjutannya agar kinerja tetap konsisten dari tahun ke tahun. Deputi Bidang IGT memahami bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak sederhana, karena harus mampu menjawab berbagai isu strategis nasional, antara lain penguatan tata kelola sawit dan pemanfaatan Ina-Geoportal untuk mendukung penanganan kemiskinan. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai langkah ditempuh melalui kerja keras dan aksi nyata yang melibatkan seluruh unsur sumber daya manusia di lingkungan Deputi Bidang IGT. Upaya tersebut mencakup peningkatan koordinasi, pemanfaatan informasi geospasial, serta penguatan kapasitas internal agar program yang dijalankan benar-benar relevan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan agenda pembangunan nasional.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

1.2.1 Kedudukan

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang IGT merupakan satu unit Eselon I dari tiga kedeputian dan satu sekretariat di BIG.

1.2.2 Tugas

Dalam Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, beserta perubahannya Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023, Deputi Bidang IGT mempunyai tugas dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT).

1.2.3 Fungsi

Berdasarkan tugas tersebut, Deputi Bidang IGT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik merupakan unit kerja eselon I di BIG. Untuk melaksanakan tugasnya didukung oleh tiga direktorat yaitu Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik; Direktorat Pemetaan Tematik; dan Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial.

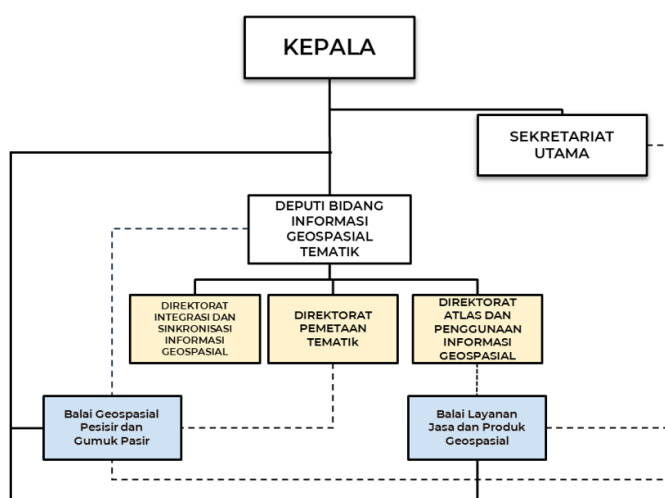
Adapun tugas dan fungsi dari ketiga direktorat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial tematik. Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT menyelenggarakan fungsi perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial tematik.
2. Direktorat Pemetaan Tematik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan tematik. Direktorat Pemetaan Tematik menyelenggarakan fungsi perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemetaan tematik.

- Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang atlas dan penggunaan informasi geospasial. Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan atlas dan penggunaan informasi geospasial.

Secara teknis operasional pelaksanaan tugas dan fungsi, ketiga direktorat tersebut didukung oleh kelompok jabatan fungsional surveyor pemetaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, ketiga direktorat tersebut saling bekerjasama dan berkolaborasi satu sama lain.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 pada 1 Juli 2024

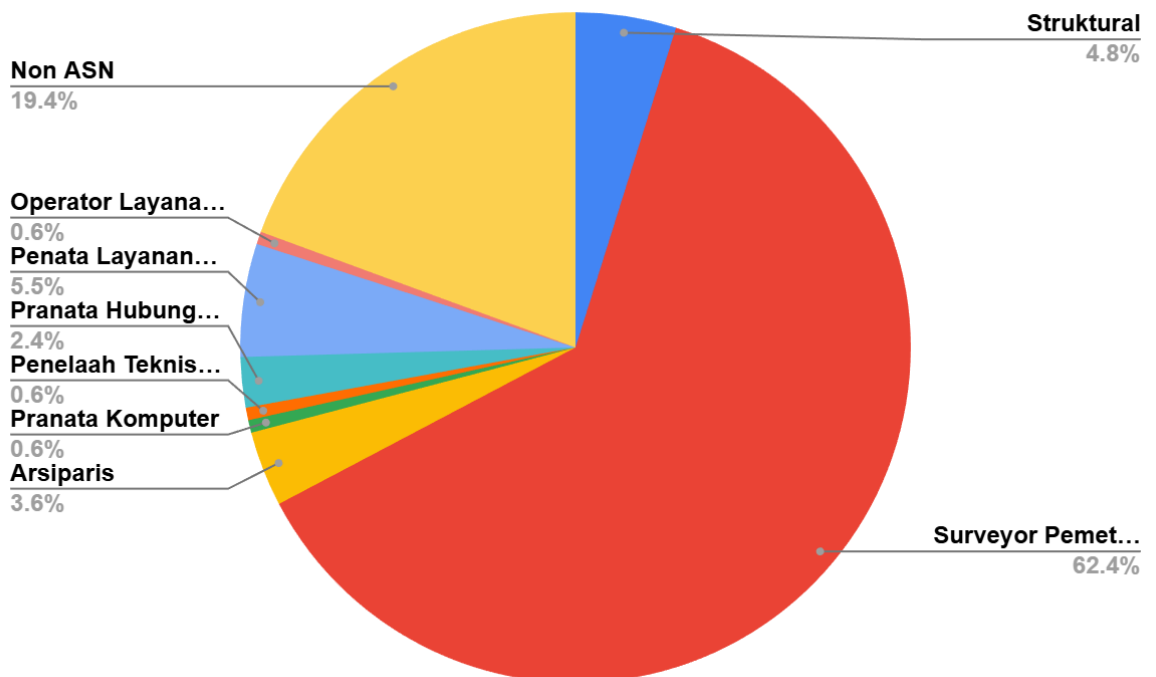
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) Kedeputusan Bidang IGT secara keseluruhan per 1 Januari 2026 berjumlah 165 personil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 orang menduduki jabatan struktural dengan perincian : Eselon I sebanyak 1 orang, Eselon II sebanyak 3 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 2 orang. Sementara itu, sisanya sebanyak 32 orang Non ASN yang berada di BGPGP sebagai petugas keamanan dan cleaning service dan 125 personil lainnya mengikuti jenjang karir dan kepangkatan melalui jabatan fungsional tertentu sesuai rincian yang tercantum pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan jabatan

Jabatan	Jumlah	%
1. Struktural	8	4.85
2. Surveyor Pemetaan	103	62.42
3. Arsiparis	6	3.64
4. Pranata Komputer	1	0.61
5. Penelaah Teknis Kebijakan	1	0.61
1. Pranata Hubungan Masyarakat	4	2.42
7. Penata Layanan Operasional	9	5.45
8. Operator Layanan Operasional	1	0.61
9. Non ASN	32	19.39
Jumlah	165	100.00

Sumber: Kepegawaian BIG, 1 Januari 2025



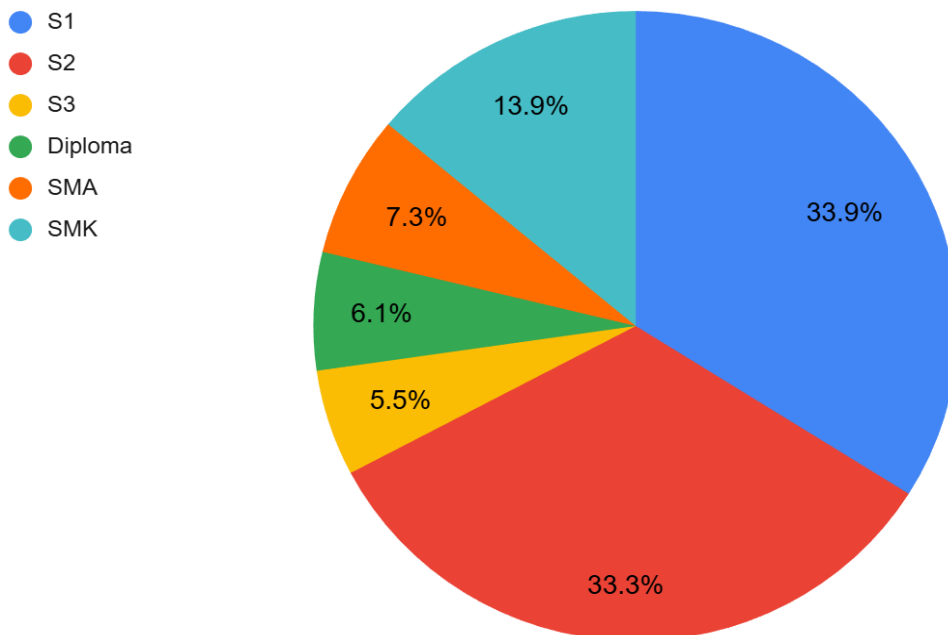
Gambar 1.2 SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan jabatan
 Sumber: Kepegawaian BIG, 1 Januari 2025

Komposisi pegawai di Deputi Bidang IGT berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang tercantum pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
1. Strata 3	56	33.94%
2. Strata 2	55	33.33%
3. Strata 1	9	5.45%
4. Diploma	10	6.06%
5. SMA	12	7.27%
6. SMK	23	13.94%
Jumlah	165	100,00

Sumber: Kepegawaian BIG, 31 Desember 2025



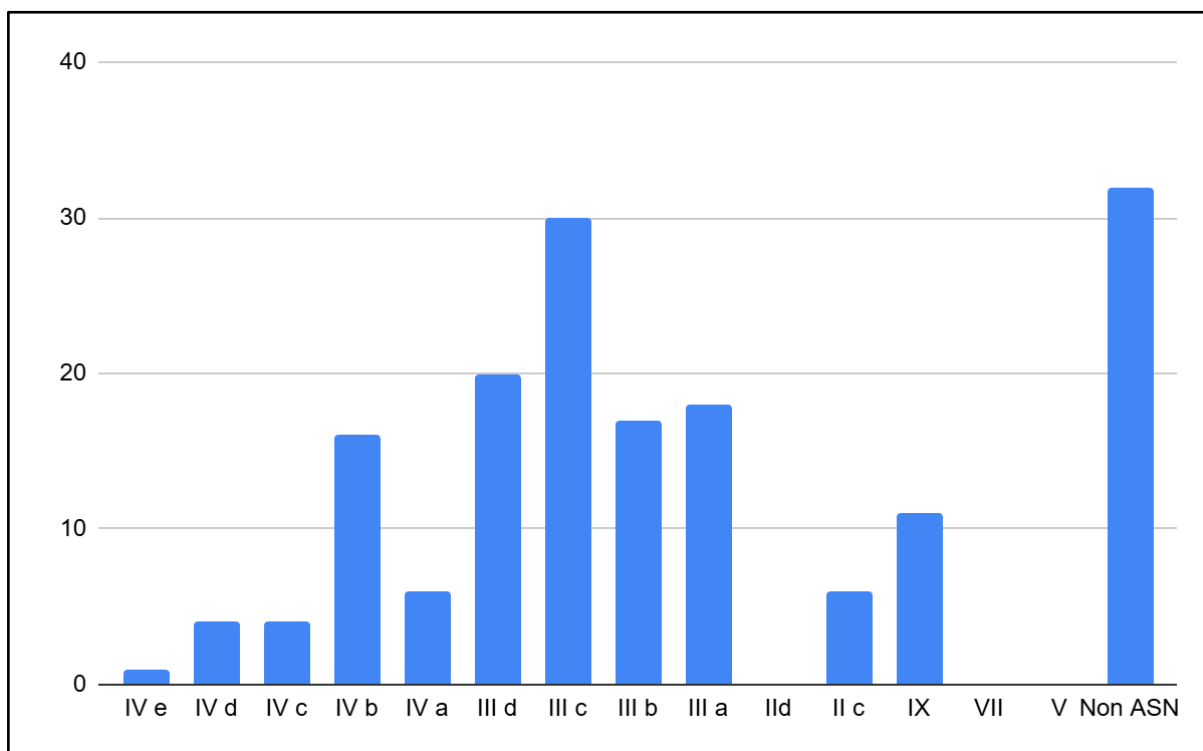
Gambar 1.3 SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan pendidikan
Sumber: Kepegawaian BIG, 1 Januari 2025

Rincian jumlah SDM DIGT berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan pangkat dan golongan

Golongan/Ruang		Jumlah	%
Pembina Utama	IV e	1	0,78
Pembina Utama Madya	IV d	4	2,33
Pembina Utama Muda	IV c	4	5,43
Pembina Tingkat I	IV b	16	12,40
Pembina	IV a	6	4,65
Penata Tingkat I	III d	20	13,18
Penata	III c	30	17,83
Penata Muda Tingkat I	III b	17	25,58
Penata Muda	III a	18	0,78
Pengatur Tingkat.I	II d	0	1,55
Pengatur	II c	6	1,55
PPPK Ahli Pertama	IX	11	9,30
PPPK Terampil	VII	0	2,33
PPPK Pemula	V	0	0,78
Non ASN	Non ASN	32	1,55
Jumlah		165	100,00

Sumber: Kepegawaian BIG, 1 Januari 2025



Gambar 1.4 SDM Kedeputusan Bidang IGT berdasarkan pangkat dan golongan

Sumber: Kepegawaian BIG, 1 Januari 2026

1.5 ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI

Dalam RPJMN Tahun 2025—2029, DIGT untuk pertama kali menjadi Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase IGT yang dimanfaatkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 pada Lampiran III halaman 1. Di samping itu, Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada RPJMN Tahun 2025—2029 masuk ke dalam 4 (empat) prioritas nasional, yaitu PN 2, PN 6, PN 7, dan PN 8. Prioritas Nasional merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025—2029, dimana untuk pencapaian sarannya, setiap PN diterjemahkan dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (PRO-P) yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di K/L, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Tujuh (7) RO pada Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan IGT dan Pengguna IG pada Kedeputusan IGT menjadi bagian dari Prioritas Nasional, dimana RO-RO tersebut tersebar pada ketiga Direktorat di Kedeputusan IGT. Prioritas Nasional tersebut masuk kedalam Program Prioritas 10 Pemerintahan Digital dan KP dan Pro-P sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 4 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

PP 10 - Pemerintahan Digital		
KP 5: Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah	PRO-P 3: Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik - Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Kegiatan/RO(Proyek): Pembinaan Penyelenggaraan IGT dan Pengguna Informasi Geospasial: - Pembinaan Penyelenggaraan IGT - Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik - IGT yang Termanfaatkan - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Geospasial - Pengembangan Kerangka Peningkatan Kapasitas Geospasial - Peningkatan Kapasitas Berbagai Komponen Ekosistem Geospasial Indonesia - Pembangunan <i>Indonesia Geospatial Business Hub</i> untuk Mewujudkan Hilirisasi Geospasial Indonesia - Desain Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim

Berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (RAKORNAS IG) 2025, yang berisi kesepakatan Kementerian/Lembaga terhadap 4 subtema: 1) Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial, 2) Pengembangan SDM IG, 3) Peningkatan Kualitas Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan 4) Kolaborasi Stakeholder Informasi Geospasial, Kedeputian IGT memiliki peran sangat strategis dalam mengawal penyelenggaraan IG Nasional. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat komitmen BIG untuk menyiapkan strategi dan implementasi pelaksanaan Rencana Aksi IG 2025-2029 sehingga K/L dapat melaksanakan Renaksi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BIG No. 31 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional Tahun 2025-2029. Berdasarkan Keputusan tersebut, Kedeputian IGT sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaporan instansi pelaksana dalam melaksanakan Renaksi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dari Renaksi. Kedeputian IGT berperan strategis sebagai *lead institution* yang mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan informasi geospasial secara nasional. BIG bertanggung jawab memastikan ketersediaan, standar, kualitas, dan keterpaduan Informasi Geospasial Dasar dan Tematik melalui penguatan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pembinaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pengembangan infrastruktur dan simpul jaringan informasi geospasial dan integrasi serta sinkronisasi IGT terkhusus di kedeputian IGT. Melalui peran tersebut, BIG menjadi penggerak utama dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan selama periode 2025–2029. Deputi Bidang IGT memiliki posisi

strategis terkait perannya dalam pembinaan IGT. Dua aturan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Perpres No. 23/2021) tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000.

Peraturan Presiden tentang KSP dan Satu Data bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Implementasi Perpres tersebut memiliki dampak besar terhadap perekonomian dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas korupsi dalam berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam. Penetapan Perpres tersebut juga sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita. DIGT melaksanakan kegiatan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik untuk menjamin tersedianya Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terstandar dalam mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Peta. Kegiatan Kompilasi dan Integrasi IGT juga sudah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029. IGT yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga masih menunjukkan perbedaan standar, referensi spasial, struktur data, dan metadata yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih informasi serta menurunkan kualitas kebijakan berbasis spasial. BIG sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Pusat dalam Satu Data Indonesia mempunyai tugas melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi atas IGT yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) memegang peran strategis melalui keterlibatannya sebagai anggota pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Kontribusi Deputi IGT diwujudkan melalui penyediaan dan integrasi informasi geospasial tematik yang akurat, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar utama penetapan kebijakan penertiban kawasan hutan, khususnya terkait penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Berdasarkan pelaksanaan Satgas PKH, dukungan Deputi IGT telah menghasilkan dampak nyata berupa tersedianya peta dan basis data terintegrasi yang mendukung proses pra-verifikasi, verifikasi, hingga penguasaan kembali kawasan hutan seluas kurang lebih dari 4 juta hektar, yang berkontribusi langsung pada pemulihan aset negara dengan nilai indikatif yang signifikan, pemulihan fungsi lingkungan hutan, serta optimalisasi penerimaan negara melalui pajak, PNBP, dan denda administratif. Dengan demikian, keterlibatan Deputi IGT tidak hanya memperkuat kepastian

hukum dan tata kelola pemanfaatan ruang, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan, transparan, dan berbasis data.

Deputi Bidang IGT menunjukkan peran strategis dalam pengentasan kemiskinan sebagai amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang merupakan Program Prioritas Nasional. Peran ditunjukkan melalui penandaan geografis pada data masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dengan menyediakan informasi koordinat pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan peran strategis DIGT dalam pengentasan kemiskinan yang mampu membuka peluang analisis yang lebih presisi, tepat sasaran, dan berbasis bukti. DIGT memberikan dukungan data geospasial bagi pemerintah untuk mengidentifikasi lokasi kantong kemiskinan, melakukan analisis untuk memahami penyebab dan pola kemiskinan di suatu wilayah, pemetaan akses terhadap pelayanan dasar, mengintegrasikan program bantuan sosial dan pembangunan, hingga menjadi dasar evaluasi program pengentasan kemiskinan.

Sebagai institusi yang bergerak dalam pembinaan dan pengintegrasian IGT, maka Deputi Bidang IGT memandang isu-isu nasional dan daerah terutama terkait keruangan dan sumberdaya alam sangat strategis dan semakin kompleks. Konflik pemanfaatan ruang, mitigasi perubahan iklim, kemiskinan ekstrim, dukungan pendapatan negara melalui pajak perkebunan sawit, penertiban kawasan hutan, pemutakhiran peta mangrove nasional, karbon biru, dan peristiwa bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Deputi Bidang IGT melalui tugas dan fungsinya mempunyai peran strategis untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Dukungan terhadap penyelenggara pemerintahan terutama dalam pendapatan negara melalui pajak perkebunan sawit, BIG mempunyai peran untuk memberikan gambaran kondisi aktual dan presisi melalui data penginderaan jauh yang dituangkan dalam DGT. Kebutuhan data ini menjadi dasar untuk penentuan objek pajak yang akan mengklarifikasi adanya ketidakselarasan pemanfaatan lahan untuk perkebunan sawit sehingga dapat diperoleh angka yang lebih akurat.

Melalui perencanaan yang telah ditetapkan dari awal tahun dan laporan akuntabilitas sebagai akhir dari penyelenggaraan pemerintahan yang menjelaskan pengentasan isu strategis nasional, LAKIN DIGT ini juga merupakan bukti bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik terus berkembang dalam mendukung kebijakan nasional yang berkesinambungan.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA



2.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIG 2025-2029

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi maka visi BIG adalah:

**“Terwujudnya Ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang
Inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Penguatan
Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”**

Sejalan dengan visinya, BIG berfokus pada pemenuhan kebutuhan para pengguna dan didorong untuk melakukan berbagai terobosan kreatif agar dapat berperan sebagai penggerak utama dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional. Secara lebih khusus, bagi Deputi Bidang IGT, istilah “pembina” dimaknai sebagai kemampuan untuk memberikan pembinaan dan pembekalan yang diperlukan oleh para penyelenggara informasi geospasial lainnya, baik melalui penyusunan kebijakan maupun penetapan standar yang dibutuhkan, serta berperan sebagai koordinator antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan IGT. Salah satu misi BIG adalah menyediakan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan mengintegrasikan informasi geospasial wilayah nasional agar dapat dimanfaatkan secara luas untuk mendukung pembangunan. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penyelenggaraan informasi geospasial tematik (IGT) di berbagai sektor dan instansi, diperlukan penerapan Kebijakan Satu Peta (KSP) atau *one map policy* yang mengusung prinsip satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal sebagai acuan bersama.

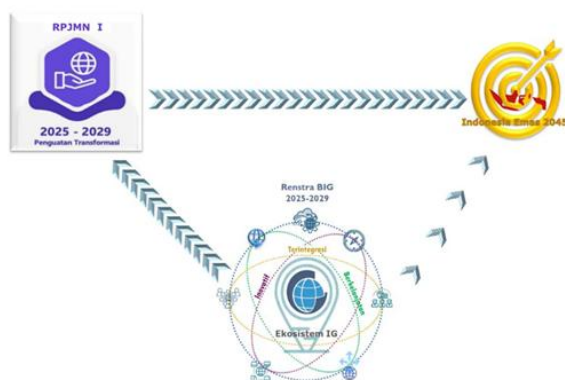
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah mendapat pengawalan secara konsisten dari Deputi Bidang IGT sejak program ini pertama kali digulirkan, guna memastikan proses integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial berlangsung dengan baik untuk mendukung pembangunan nasional berbasis kewilayahan. Langkah ini juga dimaksudkan agar data dan peta yang digunakan berbagai pihak mengacu pada referensi yang sama, sehingga pengambilan keputusan pembangunan menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Selain itu, Kebijakan Satu Peta diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pembangunan nasional, seperti konflik pemanfaatan lahan, tumpang tindih penggunaan ruang, serta ketidaksinkronan perizinan yang masih banyak terjadi. Melalui pemetaan tematik di atas peta dasar yang sama dan pengintegrasian berbagai peta tematik

untuk kepentingan pembangunan, upaya integrasi dan sinkronisasi menjadi elemen krusial dalam implementasi Kebijakan Satu Peta.

Dari visi dan misi BIG tersebut diatas, maka tujuan organisasi BIG adalah:

1. Menjamin ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia
2. Meningkatnya penggunaan informasi geospasial
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG.

Berikut adalah gambaran keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BIG tahun 2025-2029 yang disusun untuk menunjukkan tahapan pencapaian visi secara jelas sehingga apa yang harus dicapai BIG setiap tahun dapat dipetakan berdasarkan prioritas.



Gambar 2.1 Keterkaitan Visi BIG 2025—2029 dengan RPJMN Tahun 2025—2029 dan Indonesia Emas 2045

Sumber : Dokumen Renstra BIG 2025-2029

Berdasarkan *roadmap* strategi Badan Informasi Geospasial, pada Tahun 2025 Deputi Bidang IGT berperan penting dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia, meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial, meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial serta Meningkatnya pertumbuhan industri geospasial,.

2.2 RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG IGT 2025-2029

2.2.1 Reviu Renstra DIGT 2025 – 2029

Arah kebijakan dan strategi Kedeputian Bidang IGT 2025 – 2029 disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang ada di lingkup nasional serta arah kebijakan dan strategi yang ada di lingkup Badan Informasi Geospasial. Hal ini bertujuan agar arah kebijakan dan

strategi Kedeputan Bidang IGT memiliki benang merah dan mengarah secara strategis. Rencana strategis DIGT ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2025-2029

Tabel 2.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target 2025-2029

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator/Keluaran (Output)		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
2.2	Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia							
2.2	Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	2.2.1 Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat	Persentase (%)	20	24	36	48	59
		2.2.2 Persentase (%) rekomendasi penyelesaian tumpang tindih Informasi Geospasial Tematik	Persentase (%)	0	100	100	100	100
		2.2.3 Tingkat efektifitas penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program penyelenggaraan Informasi Geospasial	skala (0-3)	0	0	1.3	1.6	2
2.9	Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	2.9.1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks (1-5)	4.4	4.45	4.5	4.55	4.6
2.10	Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	2.10.1 Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial	Persentase (%)	20	40	60	80	100

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator/Keluaran (Output)		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
2.2	Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia							
	Geospasial	2.10.2 Indeks Literasi Geospasial Indonesia	Indeks (1-5)	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5

2.2.2 Visi dan Misi

Visi Deputy Bidang IGT mengacu kepada Visi Badan Informasi Geospasial yang tertera pada Dokumen Renstra Badan Informasi Geospasial tahun 2025-2029, yaitu:

“Terwujudnya Ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang Inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Penguatan Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Deputy Bidang IGT menjabarkan, selaras, dan mendukung visi BIG dan sesuai kebijakan nasional seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Sebagai *leading sector* dalam IGT, maka visi Deputy Bidang IGT berdimensi nasional atau dalam konteks ini tidak sekadar untuk internal BIG tetapi untuk memenuhi kepentingan nasional terutama IG tematik. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Deputy Bidang IGT juga mengacu kepada Misi Badan Informasi Geospasial, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia
2. Meningkatkan penggunaan informasi geospasial
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka diperlukan program kerja di Deputy Bidang IGT sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut.

Tugas :

Deputy Bidang IGT mempunyai tugas dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT)

Fungsi :

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

2.2.3 Tujuan

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BIG 2025—2029, tujuan dan sasaran yang diemban oleh **Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (Deputi IGT)** berkaitan erat dengan penyediaan, pengolahan, dan pembinaan informasi geospasial tematik (IGT) di Indonesia.

Berikut adalah rincian tujuan dan sasaran Deputi IGT menurut sumber tersebut:

- **Meningkatkan Ketersediaan IGT Nasional:** Deputi IGT bertanggung jawab atas **Sasaran Program 2.2**, yaitu meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mencakup ketersediaan tema IGT yang dibina serta cakupan wilayah IGT strategis.

- **Penyelenggaraan IGT Khusus:** Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan tercapainya **Sasaran Kegiatan 4.1**, yaitu meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir yang ditugaskan secara khusus kepada BIG. Ini meliputi:

- Integrasi dan sinkronisasi wilayah IGT hasil integrasi.
- Pemetaan wilayah IGT tertentu yang menjadi tugas BIG.
- Penyediaan cakupan wilayah atlas dan terapan informasi geospasial.

- **Pembinaan Penyelenggara dan Pengguna IGT:** Deputi IGT melalui **Sasaran Kegiatan 5.1** bertujuan untuk meningkatkan jumlah tema IGT yang telah dibina, baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun kementerian/lembaga (K/L) sebagai wali data IGT.

• **Mendukung Hilirisasi Informasi Geospasial:** Deputi ini berperan penting dalam **Misi 2 BIG**, yaitu mendorong hilirisasi informasi geospasial untuk mendukung perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan inovasi di berbagai bidang.

• **Penyelesaian Tumpang Tindih Data:** Dalam kerangka Kebijakan Satu Peta (KSP), Deputi IGT bertugas memberikan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih IGT guna menciptakan basis data yang konsisten dan akurat.

Secara struktural, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik membawahi tiga direktorat utama yang menjalankan fungsi-fungsi di atas, yaitu:

1. Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik.
2. Direktorat Pemetaan Tematik.
3. Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial

2.3 POHON KINERJA

Pohon kinerja adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dan hierarki dalam sebuah organisasi, yang mencakup atasan hingga staf di berbagai tingkatan. Ini adalah cara untuk menyajikan struktur dan hierarki hubungan kinerja dalam organisasi. Hierarki hubungan kinerja dari atasan hingga staf dapat dijelaskan dalam beberapa tingkatan. Mencakup bagaimana kinerja individu atau tim diukur, dievaluasi, dan dihubungkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Hierarki hubungan kinerja dari atasan hingga staf disusun berdasarkan aspek:

1. Tujuan Organisasi : Menyelaraskan tujuan kinerja mereka dengan tujuan keseluruhan organisasi.
2. Strategi Organisasi : Memastikan bahwa strategi organisasi diimplementasikan dengan efektif di tingkat departemen atau tim yang mereka pimpin.
3. Rencana dan Kebijakan : Mengkomunikasikan rencana dan kebijakan organisasi kepada staf, memastikan pemahaman yang baik dan implementasi yang konsisten.
4. Manajemen Kinerja : Bertanggung jawab untuk mengelola kinerja staf. Menyusun tujuan, mengukur kinerja, dan membantu staf mencapai potensi maksimal mereka.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi kepada pimpinan yang ada di bawahnya untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik ditandatangani pada tanggal **16 Januari 2025**. Namun dengan adanya dinamika dan perubahan di tahun 2025, Deputy IGT kembali menandatangani Perjanjian Kinerja pada tanggal **23 Desember 2025**. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik didukung oleh kegiatan yang dilakukan pada Direktorat Pemetaan Tematik, Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT dan Direktorat Atlas dan Penggunaan IG. Sasaran, Indikator kinerja program dan target kinerja Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik selama tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Deputy IGT Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target Awal	Revisi Target	Realisasi	Capaian
2.2	Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	2.2.1 Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat	17%	10%	10,39%	104%
2.9	Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	2.9.1. Indeks Pelayanan Publik	4,4 (Skala 1-5)	4,4 (Skala 1-5)	4,45 (Skala 1-5)	102,95%
2.10	Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	2.10.1 Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial	17%	20%	28,13%	141%
		2.10.2 Indeks Literasi Geospasial Indonesia	2,1 (Skala 1-4)	2,1 (Skala 1-4)	2,95	138,10%


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Bambang Wijanarto
Jabatan : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muh Aris Marfa'i
Jabatan : Kepala Badan Informasi Geospasial
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 16 Januari 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Muh Aris Marfa'i



Antonius Bambang Wijanarto


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK**

Kode (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
2.2	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	2.2.1 Persentase (%) cakupan IGT Pemugasan dari Pemerintah Pusat	17%
2.10	Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	2.10.1 Indeks Pelayanan Publik IG	4,4 (Skala 1-5)
		2.10.2 Persentase (%) Realisasi Layanan PNBPF Fungsional Produk dan Jasa dibandingkan dengan target Produk dan Jasa	25%
2.11	Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	2.11.1 Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial	17%
		2.11.2 Indeks Literasi Geospasial Indonesia	2,1 (Skala 1-4)

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial	Rp11.150.000.000
2. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik	Rp6.200.429.000
3. Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial	Rp3.841.655.000

Bogor, 16 Januari 2025
Kepala Badan Informasi Geospasial, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik,


Muh Aris Marfa'i


Antonius Bambang Wijanarto


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Bambang Wijanarto
Jabatan : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muh Aris Marfa'i
Jabatan : Kepala Badan Informasi Geospasial
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 23 Desember 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Muh Aris Marfa'i



Antonius Bambang Wijanarto


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK**

Kode (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
2.2	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	2.2.1 Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Pemugasan dari Pemerintah Pusat	10%
2.9	Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	2.9.1. Indeks Pelayanan Publik	4,4 (Skala 1-5)
2.10	Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	2.10.1 Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial	20%
		2.10.2 Indeks Literasi Geospasial Indonesia	2,1 (Skala 1-4)

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial	Rp4.461.822.000
2. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik	Rp2.072.247.000
3. Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial	Rp1.019.735.000

Bogor, 23 Desember 2025
Kepala Badan Informasi Geospasial, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik,


Muh Aris Marfa'i


Antonius Bambang Wijanarto

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Deputi IGT

2.5 RENCANA KERJA TAHUN 2025

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, diperlukan dokumen penganggaran. Pagu anggaran pada Kedeputian IGT terdiri dari seluruh Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Program tersebut membawahi kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (6447), Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (7063), dan Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial (6449). Dokumen tersebut tercantum pada Renja IGT tahun 2025 dengan total alokasi anggaran **Rp7.553.804.000,-**

2.6 METODE PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA

Setiap sasaran program harus terukur melalui indikator yang jelas sehingga kinerja sebuah organisasi dapat akuntabel. Deputi Bidang IGT berusaha mencapai target sasaran dengan indikator yang terukur menggunakan rumus yang telah disepakati dan bisa dijalankan secara operasional.

Setiap Sasaran Program (SP) harus berkontribusi terhadap capaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BIG. SP diukur melalui indikator kinerja program yang jelas sehingga kinerja sebuah organisasi dapat akuntabel. Deputi Bidang IGT berusaha mencapai target sasaran program dengan indikator yang terukur menggunakan rumus yang telah disepakati dan dapat dijalankan secara operasional.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Program 2.2.1

Sasaran Program	Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia
Sasaran Strategis	Tersedianya informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di Wilayah Indonesia secara berkelanjutan
IKU atasan	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Program	2.2.1 Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat

<p>Sasaran Program</p>	<p>Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia</p>
<p>Definisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> . IGT Penugasan adalah IGT yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang IGT - BIG dalam rangka memenuhi penugasan dari pemerintah pusat atau pimpinan untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional, merujuk pada PP 45/2021 pasal 14 ayat 5. . IGT Penugasan dikelompokkan menjadi 3 tema, yaitu: IGT hasil integrasi (A), IGT tertentu (B), dan IGT tema Atlas dan terapan Informasi Geospasial, merujuk pada PP 45/2021 pasal 14 ayat 5. . IGT hasil integrasi adalah IGT yang diselenggarakan oleh Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik BIG dengan mengintegrasikan data spasial tematik yang telah disusun oleh wali data IGT untuk menghasilkan data spasial tematik baru. . Persentase rata-rata target cakupan wilayah IGT Hasil Integrasi adalah perbandingan antara luas cakupan wilayah setiap tema IGT terhadap total luas cakupan wilayah setiap tema IGT secara nasional dibagi jumlah IGT hasil integrasi yang diselenggarakan oleh DISIGT sampai dengan tahun 2029 yang dinyatakan dalam persen (%). . IGT tertentu yang dimaksud adalah IGT yang ditugaskan kepada BIG dan diselenggarakan oleh Direktorat Pemetaan Tematik (DPT) dan Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGP GP). . Persentase target cakupan wilayah IGT adalah perbandingan antara luas cakupan wilayah IGT sampai dengan tahun berjalan terhadap total luas cakupan wilayah IGT yang ditugaskan. . Atlas adalah kumpulan data dan informasi geospasial yang disusun secara sistematis dan koheren dengan tema tertentu dan umumnya berskala kecil . Terapan Informasi Geospasial (IG) adalah implementasi praktis dari informasi geospasial untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dalam konteks tertentu. . Cakupan wilayah yang dimaksud adalah luas wilayah darat dari tema atlas dan terapan Informasi Geospasial yang disusun. Persentase cakupan wilayah atlas atau terapan IG merupakan rata-rata dari persentase cakupan wilayah tiap tema atlas atau terapan IG yang diselenggarakan oleh Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial.
<p>Formula/Cara Menghitung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT hasil integrasi yang dihasilkan oleh DISIGT: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 2) Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit 3) Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik 4) Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru 2. Target cakupan nasional tiap IGT yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit = 6.810 Km² yang merupakan target Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

<p>Sasaran Program</p>	<p>Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit = 36.871 Km² yang merupakan luas tutupan kelapa sawit Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. • Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik = 111 Km² terdiri dari Kota Bogor sebagai Pilot Project Penyusunan Spesifikasi Produk Data (SPD). • Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru = 2.188 km² dari luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KPPD) di Provinsi Banten, Lampung, Jawa Tengah, NTB, dan Bali. <p>3. Capaian cakupan luasan wilayah tiap IGT yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan tahun berjalan • Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan tahun berjalan • Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik sampai dengan tahun berjalan • Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru sampai dengan tahun berjalan <p>4. Menghitung Persentase rata-rata cakupan wilayah IGT hasil integrasi yang diselenggarakan oleh DISIGT (Capaian IGT A)</p> $= \frac{\left(\frac{3a}{2a} + \frac{3b}{2b} + \frac{3c}{2c} + \frac{3d}{2d}\right)}{4} \times 100\%$ <p>5. Identifikasi cakupan wilayah IGT yang dihasilkan oleh Direktorat Pemetaan Tematik pada tahun berjalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peta Sistem Lahan ○ Peta Bahaya Banjir ○ Peta Gumuk Pasir <p>6. Luas total wilayah cakupan setiap IGT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IGT Sistem Lahan 11.849 km² wilayah prioritas RDTR. 2. IGT Bahaya Banjir 1.891.306 km². 3. Peta Gumuk Pasir 4,12 km². <p>7. Menghitung persentase cakupan wilayah IGT (Capaian IGT B):</p> <p>= A/B x 100%</p> <p>Keterangan:</p> <p>A: (1a+1b+1c)</p>

<p>Sasaran Program</p>	<p>Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia</p>
	<p style="text-align: center;">B: $(2a+2b+2c)$</p> <p>8. Persentase cakupan wilayah tiap tema atlas atau terapan IG adalah perbandingan antara cakupan wilayah atlas tiap tema atau terapan IG yang telah diselesaikan sampai dengan tahun berjalan (akumulatif) dibagi total luasan cakupan wilayah atlas/terapan IG secara nasional tiap tema atlas/terapan IG</p> <p>9. IGT Tema ATLAS/Terapan IG adalah (7 tema):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atlas Taktual (2025) • Atlas Pariwisata (2025) • Atlas Kewilayahan (2025) • Data dan Informasi Geospasial untuk Aksi Iklim (2026-2028) <p>10. Capaian luasan Cakupan wilayah Atlas sampai dengan Tahun 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atlas Taktual = 209.606 km² 2. Atlas Pariwisata = 37.299 km² <p>11. Menghitung target luasan cakupan wilayah per tema atlas secara keseluruhan (jumlah target luasan cakupan wilayah secara nasional), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Atlas Taktual = 562.880 km² 5. Atlas Pariwisata = 87.409 km² 6. Atlas Kewilayahan untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (2025) = 9.456.530 km² 7. Data dan Informasi Geospasial untuk Aksi Iklim = 976.462 km² <p>12. Menghitung persentase Tema Atlas dan terapan IG (Capaian IGT C):</p> $= \frac{\text{total capaian luasan wilayah atlas dan terapan IG}}{\text{total target luasan wilayah atlas dan terapan IG}} \times 100\%$ <p>13. Persentase rata-rata cakupan IGT penugasan dihitung menggunakan rumus:</p> $= \frac{(\% \text{ capaian IGT A} + \% \text{ capaian IGT B} + \% \text{ capaian IGT C})}{3}$
<p>Satuan Pengukuran</p>	<p>Persentase (%)</p>

Sasaran Program	Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia
Unit/Penanggung jawab IKU	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT 2. Direktorat Pemetaan Tematik 3. Direktorat Atlas dan Penggunaan IG
Polarisasi	Maximize
Periode Pelaporan	Tahunan
Key Success Criteria	Meningkatnya persentase (%) cakupan IGT penugasan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Program 2.9.1

Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial
Sasaran Strategis	Meningkatnya berbagi pakai Informasi Geospasial
IKU atasan	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Program	Indeks Pelayanan Publik (Skala 1-5)
Definisi	1. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut PEKPPP adalah suatu upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik;

Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan PEKPPP; 3. Indeks Pelayanan Publik Informasi Geospasial atau IPP IG merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan PEKPPP terkait layanan informasi geospasial; 4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; 5. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk khusus untuk kegiatan Pelayanan Publik; 6. PEKPPP Mandiri Nasional adalah kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB untuk melakukan verifikasi/validasi atas hasil PEKPPP yang dilakukan oleh evaluator internal masing-masing, dan yang menerbitkan Indeks Pelayanan Publik adalah Kementerian PANRB. Adapun ULE adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB; 7. Unit Lokus Evaluasi yang selanjutnya disingkat ULE adalah Organisasi Penyelenggara yang ditunjuk untuk dilakukan PEKPPP; 8. Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP; 9. Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan

Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial
	<p>kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>10. Pelaksanaan Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.</p>
Formula/Cara Menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil dari Hasil Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Kementerian PANRB pada tahun berjalan. 2. Apabila tidak ada penilaian di tahun berjalan maka menggunakan nilai Indeks Pelayanan Publik pada tahun sebelumnya.
Satuan Pengukuran	Skala 1-5
Unit/Penanggung jawab IKU	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Hasil Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian PANRB
Polarisasi	Maximize
Periode Pelaporan	Nilai Terakhir (<i>take last known</i>)

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Program 2.10.1

Sasaran Program	Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial
Sasaran Strategis	Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial
IKU atasan	Persentase (%) IGT Strategis yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Program	Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan IG merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari data yang terkait dengan lokasi geografis atau spasial. 2. Pengguna IG meliputi instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Ruang lingkup pengguna IG dalam indikator ini mencakup lembaga pemerintah, baik instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan komunitas dan kelompok masyarakat serta setiap orang yang memanfaatkan data dan informasi geospasial. 3. Data dan informasi geospasial yang dimanfaatkan adalah atlas yang di unggah pada web e-atlas di laman : https://atlas.big.go.id/ yang diselenggarakan oleh Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial pada tahun sebelumnya dan yang tercantum dalam Rencana Strategis BIG 2025 – 2029 dalam rangka memenuhi penugasan dari pemerintah dan atau pimpinan untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.
Formula/Cara Menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target pengguna IG yang menggunakan produk atlas sampai dengan tahun berjalan, kemudian disebut X 2. Menentukan target total pengguna IG selama lima tahun, kemudian disebut Y 3. Target pengguna IG selama lima tahun adalah 1500 pengguna. 4. Menghitung persentase pengguna IG dengan rumus:

Sasaran Program	Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial
	$\% \text{ Pengguna IG} = \frac{X}{Y} \times 100\%$
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Penanggun jawab IKU	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Sumber Data	Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial
Polarisasi	Maximize
Periode Pelaporan	Nilai Terakhir (<i>take last known</i>)

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Program 2.10.2

Sasaran Program	Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial
Sasaran Strategis	Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial
IKU atasan	Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG
Indikator Kinerja Program	Indeks Literasi Geospasial Indonesia
Definisi	1. Literasi geospasial adalah kemampuan untuk menafsirkan, menggunakan, dan menyajikan informasi dan data geospasial. Memiliki literasi geospasial berarti mampu mengekstrak informasi dari sumber daya geospasial visual atau tekstual dan menempatkan informasi

<p>Sasaran Program</p>	<p>Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial</p>
	<p>tersebut dalam konteks dan penggunaan. Literasi geospasial mencakup pemahaman sistem manusia dan alam, penalaran geografis, dan pengambilan keputusan sistematis berdasarkan aspek keruangan. Literasi geospasial seringkali dianggap sebagai sebagian dari kemampuan untuk membaca peta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Indeks Literasi Geospasial adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur literasi geospasial yang berupa angka dengan cara survei. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). 3. Survei Literasi Geospasial adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat pemahaman informasi geospasial oleh pengguna terkait pengetahuan dan aspek-aspek penggunaan/pemanfaatan informasi geospasial secara menyeluruh. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Literasi Geospasial. 4. Pengguna yang dimaksud terdiri atas Kelompok Pemerintah/Pusat dan Daerah, kelompok akademisi, kelompok masyarakat dan kelompok industri. 5. Survei Literasi Geospasial yang dilakukan terhadap pengguna Informasi Geospasial terkait pengetahuan dan pelaksanaan geospasial secara menyeluruh menggunakan indikator dan metodologi survei menggunakan kuesioner tertutup (responden memilih jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner). 6. Hasil Survei Literasi Geospasial digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Literasi Geospasial Indonesia. 7. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

<p>Sasaran Program</p>	<p>Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial</p>																					
	<p>8. Metodologi dalam perhitungan Literasi Geospasial menggunakan parameter dan bobot berikut:</p> <table border="1" data-bbox="502 427 1259 891"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Bobot</th> <th>Skala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Pengetahuan (A)</td> <td rowspan="4">0.4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Keterampilan (B)</td> <td rowspan="4">0.3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Budaya (C)</td> <td rowspan="4">0.3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ref :</p> <p>Moorman, Lynn (2019) https://doi.org/10.1007/978-3-030-06058-9_2</p> <p>Appel, Stephen (2020) https://doi.org/10.1080/15420353.2020.1760175</p> <p>Indeks Literasi Keuangan (OJK) https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20(SNLIK)%202024.pdf</p> <p>Indeks Literasi Digital (Komdigi)</p> <p>https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Report_Nasional_2022_FA_3101.pdf</p>	Parameter	Bobot	Skala	Pengetahuan (A)	0.4	1	2	3	4	Keterampilan (B)	0.3	1	2	3	4	Budaya (C)	0.3	1	2	3	4
Parameter	Bobot	Skala																				
Pengetahuan (A)	0.4	1																				
		2																				
		3																				
		4																				
Keterampilan (B)	0.3	1																				
		2																				
		3																				
		4																				
Budaya (C)	0.3	1																				
		2																				
		3																				
		4																				
<p>Formula/Cara Menghitung</p>	$\text{Indeks } A = \frac{(\text{Total konversi jawaban responden} / \text{jumlah soal parameter } A)}{\text{jumlah responden}} \times 0,4$ $\text{Indeks } B = \frac{(\text{Total konversi jawaban responden} / \text{jumlah soal parameter } B)}{\text{jumlah responden}} \times 0,3$ $\text{Indeks } C = \frac{(\text{Total konversi jawaban responden} / \text{jumlah soal parameter } C)}{\text{jumlah responden}} \times 0,3$ $\text{Indeks Literasi Geospasial} = \text{Indeks } A + \text{Indeks } B + \text{Indeks } C$																					

Sasaran Program	Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-4)
Unit/Penanggunung jawab IKU	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Sumber Data	Hasil Survei Literasi Geospasial
Polarisasi	Maximize
Periode Pelaporan	Tahunan

Tinjauan rencana kerja tahun 2025 terhadap dokumen rencana strategis Deputi Bidang IGT 2025-2029 menunjukkan bahwa rencana kerja yang disusun pada tahun bersangkutan memiliki target yang sedikit berbeda dengan target rencana strategis DBIGT untuk mengakomodir dinamika serta perubahan kondisi dan kebijakan yang berjalan.

BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA



LAPORAN KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG IGT TAHUN 2025

Capaian kinerja pada kedeputusan IGT diukur berdasarkan Manual Indikator Kinerja Program. Pada manual tersebut dijelaskan bagaimana mengukur capaian kinerja program Kedeputusan Bidang IGT. Untuk setiap Sasaran Program (SP) dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target/sasaran dengan realisasi tahun 2025, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum capaian kinerja Deputi Bidang IGT 2025 tergolong baik karena target setiap indikator kinerja sasaran program secara keseluruhan dapat terpenuhi. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran program yang merupakan gambaran telah berjalannya tugas dan fungsi Deputi Bidang IGT. Tabel 10 menunjukkan capaian kinerja Deputi Bidang IGT tahun 2025. Semua Sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IGT telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 DIGT

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Capaian
2.2.Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir seluruh Wilayah Indonesia	IKP 2.2.1	Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat	17%	10%	10,39%	104%
2.9.Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	IKP 2.9.1	Indeks Pelayanan Publik	4,4 (Skala 1-5)	4,4 (Skala 1-5)	4,45 (Skala 1-5)	102,95%
2.10.Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	IKP 2.10.1	Persentase (%) pengguna	17%	20%	28,13%	141%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Capaian
		Informasi Geospasial				
	IKP 2.10.2	Indeks Literasi Geospasial Indonesia	2,1 (Skala 1-4)	2,1 (Skala 1-4)	2,95 (Skala 1-4)	138,10%

Pelaksanaan dan capaian output di atas untuk mendukung sasaran program seperti dijabarkan dalam berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Program Deputi Bidang IGT

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Realisasi		Capaian kinerja sasaran program	Ket
					Rincian Output	Volume		
1	2.2 Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	IKP 1.Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat	20%		a. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	8,248	10,39%	
					b. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit	26508		

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Realisasi		Capaian kinerja sasaran program	Ket
					Rincian Output	Volume		
					c. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik	133157		
					d. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru	8935		
					a. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan tahun berjalan	2,160		
					b. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian	2773		

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Realisasi		Capaian kinerja sasaran program	Ket
					Rincian Output	Volume		
					Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan tahun berjalan			
					c. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik sampai dengan tahun berjalan	111		
					d. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru sampai dengan tahun berjalan	58		
					e. Peta Sistem Lahan	392		

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Realisasi		Capaian kinerja sasaran program	Ket
					Rincian Output	Volume		
					f. Peta Bahaya Banjir	22592		
					g. Peta Gumuk Pasir	0		
					h. Atlas Taktual (2025)	304,601		
					i. Atlas Pariwisata (2025)	37,299		
					j. Atlas Kewilayahan (2025)	1,891,306		
2	2.9.Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh	IKP 1. Indeks Pelayanan Publik	4,4 (skala 1-5)		Hasil Penilaian Menpan RB		4.45	

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Realisasi		Capaian kinerja sasaran program	Ket
					Rincian Output	Volume		
	pengguna Informasi Geospasial							
3	2.10.Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	IKP 1. Persentase (%) pengguna Informasi Geospasia	20%		Capaian pengguna IG yang menggunakan produk atlas sampai dengan tahun berjalan	422	28,13%	
		IKP 2. Indeks Literasi Geospasial Indonesia	2,1 (skala 1-4)		Hasil Survei Literasi Geospasial	2.95	2,95	

Sumber: Capaian Kegiatan DBIGT Tahun 2025

3.1.1 Capaian Kinerja 2025 Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Seluruh capaian kinerja program Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Sasaran Program Deputi Bidang IGT juga telah berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kepala BIG. Berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut tabel perbandingan capaian tahun 2024 dengan 2025.

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Sasaran Program Deputi Bidang IGT Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	77%	77,8%	100%
		Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan IGT strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional	89%	90,5%	101%
		Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P	95%	95,25%	100%
		Persentase (%) Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG	43%	44,98%	102%

Sumber: Capaian Kegiatan Deputi Bidang IGT Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Capaian
2.2.Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	IKP 2.2.1	Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat	17%	10%	10,39%	104%
2.9.Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	IKP 2.9.1	Indeks Pelayanan Publik	4,4 (Skala 1-5)	4,4 (Skala 1-5)	4,45 (Skala 1-5)	102,95%
2.10.Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	IKP 2.10.1	Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial	17%	20%	28,13%	141%
	IKP 2.10.2	Indeks Literasi Geospasial Indonesia	2,1 (Skala 1-4)	2,1 (Skala 1-4)	2,95 (Skala 1-4)	138,10%

Sumber: Capaian Kegiatan Deputy Bidang IGT Tahun 2025

3.1.2 Capaian Kinerja 2025 Dibandingkan Dengan Target Rencana Strategis 2025-2029

Capaian kinerja program Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik sampai dengan tahun 2025 telah sesuai dengan target Rencana Strategis Deputy Bidang IGT BIG Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Program Deputy Bidang IGT Tahun 2025 dengan Rencana Strategis

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target Renstra	Target Revisi	Realisasi	Capaian
2.2.Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	IKP 2.2.1	Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat	17%	10%	10,39%	104%
2.9.Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	IKP 2.9.1	Indeks Pelayanan Publik	4,4 (Skala 1-5)	4,4 (Skala 1-5)	4,45 (Skala 1-5)	102,95%
2.10.Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	IKP 2.10.1	Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial	17%	20%	28,13%	141%
	IKP 2.10.2	Indeks Literasi Geospasial Indonesia	2,1 (Skala 1-4)	2,1 (Skala 1-4)	2,95 (Skala 1-4)	138,10%

Indikator Kinerja Program 2.2.1

Dalam periode renstra tahun 2025-2029, capaian kinerja Deputi IGT 2.2.1 adalah Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat.

Informasi Geospasial Tematik (IGT) Penugasan merupakan IGT yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang IGT Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memenuhi penugasan dari pemerintah atau pimpinan dalam rangka mendukung kebutuhan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam PP 45 Tahun 2021 Pasal 14 ayat 5. IGT Penugasan dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu IGT hasil integrasi (A), IGT tertentu (B), serta IGT tema atlas dan terapan informasi geospasial (IG), yang bersama-sama menjadi instrumen penting dalam penyediaan data dan informasi geospasial tematik yang terpadu, andal, dan berkesinambungan.

IGT hasil integrasi diselenggarakan oleh Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik (DISIGT) dengan cara mengintegrasikan data spasial tematik yang telah

disusun oleh walidata IGT untuk menghasilkan data spasial tematik baru yang lebih komprehensif. Dalam konteks perencanaan kinerja, persentase rata-rata target cakupan wilayah IGT hasil integrasi didefinisikan sebagai perbandingan antara luas cakupan wilayah setiap tema IGT terhadap total luas cakupan wilayah setiap tema IGT secara nasional, yang kemudian dibagi dengan jumlah IGT hasil integrasi yang diselenggarakan oleh DISIGT sampai dengan tahun 2029 dan dinyatakan dalam persen (%).

IGT tertentu merupakan IGT yang secara khusus ditugaskan kepada BIG dan diselenggarakan oleh Direktorat Pemetaan Tematik (DPT) serta Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGPGP), terutama untuk menjawab kebutuhan pemetaan tematik yang bersifat strategis dan/atau mendesak. Persentase target cakupan wilayah IGT tertentu dihitung sebagai perbandingan antara luas cakupan wilayah setiap tema IGT sampai dengan tahun berjalan terhadap total luas cakupan wilayah setiap tema IGT, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah IGT yang diselenggarakan sampai dengan tahun 2029.

Tema atlas dan terapan IG memegang peran penting dalam mendiseminasikan data dan informasi geospasial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Atlas didefinisikan sebagai kumpulan data dan informasi geospasial yang disusun secara sistematis dan koheren dengan tema tertentu dan umumnya berskala kecil, sedangkan terapan IG adalah implementasi praktis dari informasi geospasial untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dalam konteks tertentu. Cakupan wilayah yang dimaksud pada tema ini adalah luas wilayah darat dari tema atlas dan terapan IG yang disusun, dengan persentase cakupan wilayah atlas atau terapan IG dinyatakan sebagai rata-rata dari persentase cakupan wilayah tiap tema atlas atau terapan IG yang diselenggarakan oleh Direktorat Atlas dan Penggunaan IG.

Indikator Kinerja Program 2.9.1

Dalam periode renstra tahun 2025-2029, capaian kinerja Deputi IGT adalah Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Salah satu tujuan penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial oleh berbagai pemangku kepentingan. Tujuan ini dapat tercapai jika terselenggara pelayanan publik bidang informasi geospasial yang berkinerja prima. Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Informasi Geospasial dapat diukur jika terdapat Standar Pelayanan. Standar Pelayanan yang disusun oleh BIG merupakan titik temu antara kemampuan penyelenggara pelayanan, yaitu BIG, dan harapan penerima pelayanan. Jika telah tersedia Standar Pelayanan, maka kewajiban bagi penyelenggara pelayanan

memaklumkan kepada publik, sebagai wujud janji dan komitmen untuk melakukan perbaikan dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam implementasinya, Standar Pelayanan wajib dilaksanakan, didokumentasikan pelaksanaannya dan dipantau atau dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di BIG diukur melalui beberapa program. Salah satu indikator kinerja pelayanan publik yang digunakan oleh BIG adalah Indeks Pelayanan Publik, yaitu hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Indeks Pelayanan Publik menjadi Indikator Kinerja Program pada Deputi bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT), dan menjadi indikator capaian pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG. Kinerja pelayanan publik di BIG juga dievaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP), dan pengaduan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam SKM, FKP, dan pengaduan, merepresentasikan demokrasi dalam proses pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh BIG, sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus menyelenggarakan Informasi Geospasial.

Laporan Pelayanan Publik Informasi Geospasial ini berisi rangkaian kegiatan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh BIG sebagai badan publik, mulai dari penyusunan Standar Pelayanan, Kinerja Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, Forum Konsultasi Publik, hingga Inovasi Pelayanan Publik. Laporan ini juga merupakan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik yang berpedoman pada Keputusan Kepala BIG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial, dan Indikator Kinerja Deputi IGT yaitu Indeks Pelayanan Publik Informasi Geospasial. Seluruh kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tujuan utama meningkatkan penggunaan Informasi Geospasial di Indonesia.

Indikator Kinerja Program 2.10.1

Dalam periode renstra tahun 2025-2029, capaian kinerja Deputi IGT adalah Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial

Penggunaan Informasi Geospasial (IG) merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh berbagai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari data dan informasi yang terkait dengan lokasi geografis atau spasial yang tersaji dalam bentuk peta, atlas, maupun produk geospasial lainnya. Melalui IG, pengguna dapat memahami kondisi keruangan suatu wilayah secara lebih komprehensif sehingga mampu mendukung

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program pembangunan di berbagai sektor. Dalam konteks pembangunan nasional, pemanfaatan IG berperan sebagai landasan objektif bagi pengambilan keputusan yang berbasis bukti, berorientasi wilayah, dan selaras dengan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia.

Pengguna IG meliputi instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang yang memerlukan data dan informasi geospasial untuk mendukung tugas, kepentingan, dan aktivitasnya. Ruang lingkup pengguna IG dalam indikator ini mencakup lembaga pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, komunitas dan kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, pelaku usaha, organisasi nonpemerintah, serta individu yang memanfaatkan data dan informasi geospasial untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kegiatan edukasi dan literasi geospasial. Semakin banyak dan semakin beragam pihak yang memanfaatkan IG secara tepat, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan dan menyediakan data serta informasi geospasial melalui berbagai platform, salah satunya dalam bentuk atlas yang diunggah pada web e-Atlas Nasional Indonesia di laman atlas.big.go.id. E-Atlas merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang dikembangkan sebagai media penyebarluasan informasi geospasial dengan format kartografi web, *storymap*, dan e-book yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas. Melalui e-Atlas, pengguna dapat menjelajahi berbagai atlas multitema yang mencakup kelompok tema wilayah, sumber daya, lingkungan, sosial-ekonomi, transportasi, dan tema strategis lainnya, yang terus diperbarui seiring berkembangnya kebutuhan data dan teknologi geospasial.

Penyelenggaraan e-Atlas dan pemanfaatan data yang dikandung di dalamnya berada dalam lingkup tugas unit terkait di BIG yang bertanggung jawab atas penyediaan dan penyebarluasan atlas nasional. Produk atlas yang dimuat di e-Atlas merupakan hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemenuhan penugasan dari pemerintah dan/atau pimpinan, khususnya untuk menyediakan informasi geospasial yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Melalui dashboard dan sistem pengelolaan pengguna, e-Atlas juga mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan IG sehingga dapat menjadi dasar penguatan kapasitas pengguna di masa mendatang.

Seluruh upaya penyediaan dan pemanfaatan atlas melalui e-Atlas tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Strategis BIG 2025–2029, yang

menekankan peningkatan ketersediaan, keterpakaian, dan kapabilitas pengguna informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional. Renstra tersebut memuat tujuan peningkatan kapasitas pengguna IG, termasuk persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang mampu menggunakan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pemanfaatan atlas pada e-Atlas menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program strategis BIG. Dengan demikian, penggunaan IG melalui pemanfaatan atlas di e-Atlas bukan hanya sekadar akses terhadap peta digital, tetapi merupakan bagian dari ekosistem geospasial nasional yang dirancang untuk memperkuat perencanaan pembangunan, pengelolaan wilayah, dan pelayanan publik berbasis informasi spasial.

Indikator Kinerja Program 2.10.2

Dalam periode renstra tahun 2025-2029, capaian kinerja Deputi IGT 2.10.2 adalah Indeks Literasi Geospasial

Literasi geospasial merupakan kemampuan individu dalam menafsirkan, menggunakan, dan menyajikan data dan informasi geospasial. Kemampuan literasi geospasial mencakup pengetahuan untuk mengekstrak informasi dari berbagai sumber visual maupun tekstual, dan menempatkannya dalam konteks spasial yang tepat. Literasi geospasial tidak hanya berhubungan dengan keterampilan membaca peta, tetapi juga dengan pemahaman sistem interaksi antara manusia dan alam, penalaran geografis, serta pengambilan keputusan berdasarkan aspek spasial.

Peningkatan literasi geospasial di masyarakat ditandai dengan kemampuan mereka yang semakin baik dalam memahami, menafsirkan, dan memanfaatkan informasi berbasis spasial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dukungan perkembangan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), citra satelit, serta aplikasi pemetaan yang terdapat di smartphone, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses dan mengolah data dan informasi geospasial. Hal ini memperkuat partisipasi publik dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan tata ruang wilayah, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk pengukuran perkembangan literasi geospasial tersebut, Badan Informasi Geospasial menetapkan Indeks Literasi Geospasial sebagai salah satu indikator kinerja strategis dengan target capaian 2,4 (skala Likert 1–4) pada akhir periode Rencana Strategis 2025–2029. Peningkatan literasi geospasial dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu sosialisasi pemanfaatan informasi geospasial kepada kelompok masyarakat, pemanfaatan aplikasi e-atlas untuk pembelajaran, dan penerimaan kunjungan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi

terhadap pentingnya informasi geospasial dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

3.1.3 Realisasi dan Evaluasi Kinerja Dibandingkan Terhadap Internal BIG/Nasional/Internasional

Capaian di Kedeputan IGT yang berkaitan dengan program nasional diantaranya adalah Percepatan Kebijakan Satu Peta. Dalam perjalanannya, kegiatan tersebut membawahi kegiatan berikut baik dari koordinasi maupun datanya :

1) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)

Dalam kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) memainkan peranan sentral dalam mendukung kerja Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui kegiatan evaluasi dan realisasi kebijakan berbasis data spasial. Melalui integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT), BIG berhasil menyatukan data lintas sektor—khususnya pada bidang perkebunan kelapa sawit dan pertambangan—guna mendukung penertiban penguasaan lahan yang tidak sesuai peruntukan. Pada sektor perkebunan, BIG menjalankan proses komprehensif mulai dari analisis awal, klarifikasi dengan subjek hukum, hingga verifikasi lapangan yang menghasilkan pemulihan aset negara bernilai signifikan, mencapai Rp150 Triliun dari total 3,31 juta hektar lahan yang berhasil dikuasai kembali. Sementara dalam sektor pertambangan, BIG memanfaatkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala besar 1:5.000 sebagai dasar identifikasi area tambang yang berada dalam kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Pendekatan ini menghasilkan data akurat seluas 8.081 hektar area indikatif pelanggaran, melampaui target rencana aksi, serta menjadi rujukan bagi langkah penegakan hukum selanjutnya. Kombinasi fungsi evaluatif dan implementatif ini memperlihatkan peran BIG bukan hanya sebagai penyedia data spasial, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memperkuat tata kelola ruang berbasis bukti ilmiah. Selain itu, BIG turut merekomendasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) formal dan penguatan sistem pengawasan berbasis citra satelit agar proses penertiban lahan berlangsung konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan ekologis. Dengan demikian, kontribusi BIG dalam Satgas PKH tidak hanya memperbaiki tata kelola perizinan dan pemanfaatan ruang, tetapi juga mempertegas komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

2) Dukungan untuk percepatan tata ruang serta pemanfaatan/penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Sebagai bagian integral dari pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), Kedepujian Informasi Geospasial Tematik (IGT) memegang tanggung jawab utama dalam penyusunan, pengelolaan, serta integrasi berbagai peta tematik yang menjadi acuan dalam proses perencanaan dan penataan ruang nasional. Melalui sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Kedepujian IGT menjamin bahwa seluruh informasi spasial tematik—mulai dari peta perencanaan ruang, status lahan, potensi wilayah, perizinan, hingga kebencanaan—dapat dihimpun secara sistematis, diintegrasikan, dan disajikan dalam satu pangkalan data geospasial nasional yang terstandar dan mudah diakses.

Dalam pelaksanaannya, Kedepujian IGT berperan untuk:

- Merumuskan serta mengendalikan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik.
- Menyusun rencana, program, dan pengembangan peta tematik serta atlas tata ruang secara berkelanjutan.
- Melakukan integrasi dan harmonisasi data spasial tematik dari berbagai instansi guna mengurangi tumpang tindih serta konflik pemanfaatan ruang.
- Menyediakan data spasial tematik terbaru melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta, yang berfungsi mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), mempercepat proses perizinan berusaha, dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan tumpang tindih lahan.
- Mendukung beragam program strategis pemerintah, seperti penyusunan Masterplan Kawasan Strategis Nasional, reforma agraria, penataan wilayah prioritas, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) serta inisiatif ketahanan pangan nasional.

Dengan fungsi strategis tersebut, Kedepujian IGT tidak hanya berperan dalam mempercepat penetapan dan penyesuaian tata ruang nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis spasial yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keberlanjutan. Keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan tatanan ruang yang lebih tertib, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, sejumlah unit di bawah koordinasi Kedepujian IGT terlibat aktif dalam Tim Terpadu Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar (IGD), yaitu tim yang bertugas menerima, menelaah, serta memberikan rekomendasi terhadap permohonan penggunaan IGD oleh penyelenggara geospasial tematik. Tim ini berwenang memastikan bahwa setiap permohonan pemanfaatan data geospasial dasar dilakukan secara tepat dan sesuai

ketentuan, baik untuk penggunaan mandiri oleh instansi terkait maupun dalam rangka kerja sama teknis dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Dengan mekanisme ini, penyelenggaraan geospasial tematik dapat berjalan lebih terarah, terkontrol, dan konsisten dalam mendukung kebijakan pengelolaan ruang nasional.

3) Realisasi Kinerja IGT terhadap kegiatan internal BIG

Realisasi kinerja Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada kegiatan internal BIG menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui seluruh target yang ditetapkan dalam Renstra. Cakupan Informasi Geospasial Tematik penugasan dari pemerintah pusat terealisasi sebesar 10,39% dari target 10%, sehingga capaian mencapai 104%, yang menggambarkan kemampuan unit IGT dalam menyelesaikan dan mengintegrasikan produk IGT sedikit di atas rencana. Indeks Pelayanan Publik juga menunjukkan kinerja layanan yang sangat baik, dengan nilai 4,45 pada skala 1–5 dari target 4,4 (capaian 102,95%), yang mengindikasikan bahwa mekanisme pelayanan, SOP internal, serta koordinasi antarunit dalam menyediakan dan melayani kebutuhan data geospasial berjalan efektif dan responsif. Pada sisi penguatan pemanfaatan, persentase pengguna informasi geospasial mencapai 28,13% dari target 20% (capaian 141%), dan Indeks Literasi Geospasial Indonesia mencapai 2,95 pada skala 1–4 dari target 2,1 (capaian 138,10%), menunjukkan bahwa berbagai kegiatan internal seperti diseminasi, sosialisasi, pelatihan, penguatan geoportal, serta kemudahan akses data dan peta berhasil meningkatkan penggunaan dan pemahaman informasi geospasial secara signifikan. Secara keseluruhan, angka-angka tersebut menegaskan bahwa kinerja internal IGT di BIG telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan ketersediaan IGT mutakhir, kualitas layanan, serta kapasitas dan literasi pengguna, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis spasial yang lebih baik di tingkat nasional.

4) Dukungan IGT terhadap kegiatan internasional

4.1) Fifth Plenary Meeting of the High-Level Group on the United Nations-Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF) di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi

Kegiatan ini diwakili oleh Dr. Antonius Bambang Wijanarto dari Badan Informasi Geospasial (BIG), dalam rangkaian pertemuan *5th Plenary Meeting of the High-Level Group on the United Nations-Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF)* dan *Expanded Bureau Meeting UN-GGIM* yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 2 hingga 4 Februari 2025. Keikutsertaan ini dinilai sangat strategis bagi Indonesia untuk memperkuat peran di kancah internasional serta meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan data geospasial guna mendukung kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Fokus utama dari pertemuan tersebut adalah merumuskan prioritas kegiatan tahun 2025 untuk mempercepat

implementasi kerangka *UN-IGIF* dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta menyelaraskan rencana kerja dengan *UN-Global Geospatial Knowledge and Innovation Center (UN-GGKIC)* yang berkedudukan di Deqing, China.

Beberapa poin penting yang dihasilkan meliputi penyempurnaan dokumen *UN-IGIF*, pengembangan strategi komunikasi, serta percepatan pembentukan *SDG Data Hub* dan *SIDS Global Data Hub* bagi negara-negara berkembang dan negara kepulauan kecil. Selain itu, forum menekankan pentingnya berbagi praktik terbaik, pelaksanaan pelatihan, serta pembentukan Kelompok Penasihat Teknis Virtual untuk memberikan bantuan teknis di wilayah Pasifik. Hasil dari pertemuan di Jeddah ini akan ditindaklanjuti pada pertemuan anggota *International Advisory Committee (IAC)* di China pada Mei 2025 dan akan dilaporkan dalam sidang *UN-GGIM* ke-15 di New York pada Agustus 2025. Perlu dicatat bahwa pembiayaan perjalanan dinas ini sepenuhnya ditanggung oleh Sekretariat *UNGGIM*, sementara keikutsertaan dua staf BIG lainnya dibatalkan atas dasar efisiensi anggaran



Gambar 3.1 Fifth Plenary Meeting of the High-Level Group on the United Nations-Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF) di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi

4.2) Executive Board (EB) meeting of the Regional Committee of the United Nations on Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP), Deqing, China

Executive Board (EB) Meeting of the Regional Committee of the United Nations on Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP) yang diselenggarakan di Deqing, China, pada tanggal 3 hingga 5 Juni 2025. Pertemuan yang dipimpin oleh Antonius Bambang Wijanarto selaku Presiden UN-GGIM-AP ini berfokus pada evaluasi kemajuan kelompok kerja regional serta persiapan strategis untuk menghadapi Sesi ke-15 UN-GGIM di New York pada Agustus 2025 dan Rapat Pleno ke-14 di Republik Korea pada September 2025. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pemilihan Dewan Eksekutif baru untuk masa jabatan 2025-2028, yang mencakup penetapan prosedur pencalonan serta tenggat waktu penyampaian minat dari negara-negara anggota hingga Agustus 2025. Selain itu, forum ini mengevaluasi pembentukan kelompok kerja baru dengan tema-tema masa depan seperti AI Working Group, Young Geospatial Leaders Network, dan

bantuan teknis untuk wilayah Pasifik guna menyelaraskan dengan Kerangka Strategis UN-GGIM 2025–2030.

Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pula pentingnya dukungan negara anggota terhadap keberlangsungan Sekretariat UN-GGIM-AP di bawah naungan ESCAP, mengingat adanya kendala finansial yang dihadapi PBB saat ini. Peserta memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Tiongkok atas kontribusi tenaga profesional muda yang sangat membantu kapasitas koordinasi Sekretariat Regional. Selain menghadiri rapat dewan eksekutif, delegasi juga berpartisipasi dalam seminar mengenai pengembangan kecerdasan spasio-temporal dalam tata kelola pertanahan nasional. Sebagai catatan administratif, perjalanan dinas ini dilaksanakan dengan biaya mandiri, dan seluruh hasil diskusi akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi virtual maupun pertemuan pleno mendatang untuk memastikan integrasi informasi geospasial tetap menjadi pilar pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.



Gambar 3. 2 Executive Board (EB) meeting of the Regional Committee of the United Nations on Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP), Deqing, China

4.3) Fifteenth session of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UNGGIM) di Amerika Serikat

Laporan ini merinci partisipasi delegasi Indonesia dalam Sesi ke-15 United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) yang berlangsung di New York pada tanggal 2 hingga 9 Agustus 2025. Diwakili oleh Antonius Bambang Wijanarto dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia menjalankan peran strategis sebagai Presiden UN-GGIM Asia Pasifik, anggota High Level Group on UN-IGIF,

serta Co-Chair International Advisory Committee untuk UN-GGKIC. Selama rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia memberikan kontribusi signifikan dengan memaparkan studi kasus keberhasilan implementasi kerangka kerja terintegrasi informasi geospasial (UN-IGIF) dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan dan aksi iklim melalui Net FOLU, yang mendapatkan apresiasi luas sebagai percontohan bagi negara anggota lainnya. Selain itu, Indonesia menyampaikan pernyataan resmi mengenai dukungan terhadap penetapan Hari Geospasial Dunia serta mendorong penguatan kolaborasi dengan 42 entitas PBB lainnya guna mengarusutamakan pentingnya informasi geospasial di berbagai bidang. Delegasi juga memaparkan bahwa rencana strategis penyelenggaraan informasi geospasial nasional telah terintegrasi dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045, termasuk penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050 sebagai amanah regulasi domestik. Keberhasilan Indonesia dalam menjadi tuan rumah lokakarya internasional dan keterlibatan aktif dalam pengembangan kapasitas geodesi regional semakin memperkuat pengakuan global terhadap kepemimpinan Indonesia. Hasil pertemuan ini menekankan bahwa pengelolaan informasi geospasial yang visioner sangat krusial dalam menjawab tantangan global seperti mitigasi bencana, perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.



Gambar 3.3 Fifteenth session of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UNGGIM) di Amerika Serikat

4.4) 14th Plenary Meeting of UN-GGIM-AP

Pertemuan Pleno ke-14 UN-GGIM-AP yang berlangsung di Goyang, Korea Selatan, pada tanggal 24 hingga 26 September 2025, dengan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Antonius Bambang Wijanarto selaku Presiden UN-GGIM-AP periode 2023-2025 dan didampingi oleh Dr. Dheny Trie Wahyu Sampurno. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup Geoforum for Asia and the Pacific 2025 yang menghadirkan seminar mengenai inovasi GeoAI dalam pengambilan keputusan, strategi integrasi dan berbagi data, kebijakan tata kelola

geospasial masa depan, serta peran penting kerangka referensi geodesi bagi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dilaksanakan pula lokakarya UN-IGIF yang berfokus pada strategi kepemimpinan dan kerja sama multipihak untuk menyukseskan implementasi kerangka kerja informasi geospasial terintegrasi di kawasan tersebut. Salah satu hasil krusial dari pertemuan ini adalah amandemen statuta organisasi yang memungkinkan struktur kepengurusan yang lebih luas, serta penetapan Dewan Eksekutif baru periode 2025-2028 secara aklamasi dengan India dan Korea Selatan sebagai Co-Chairs. Indonesia berhasil mempertahankan peran strategisnya dengan terpilih sebagai salah satu Vice-Chair bersama Tiongkok dan Singapura, di mana Dr. Dheny Trie Wahyu Sampurno menjabat sebagai Vice-Chair tersebut. Selain itu, sejumlah staf dari Badan Informasi Geospasial juga ditunjuk sebagai wakil ketua pada lima kelompok kerja (Working Groups), termasuk kelompok kerja baru mengenai GeoAI yang baru saja dibentuk atas usulan Tiongkok. Pertemuan ini diakhiri dengan pembahasan rencana masa depan, termasuk mempertimbangkan tawaran dari Pemerintah Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah pertemuan pleno ke-15 di Riyadh pada November 2026 mendatang yang akan diselenggarakan bersamaan dengan Third World Geospasial Information Congress.





Gambar 3.4 14th Plenary Meeting of UN-GGIM-AP

4.5) Expert Consultation and Meeting on Enhancing Geospatial Information Management Arrangements and Accelerating the Implementation of the Sustainable Development Goals and the Sub regional Workshop on the United Nations Integrated Geospatial Information Framework for Central Asia, South Asia and neighboring countries di Astana, Kazakhstan

Expert Consultation dan Workshop Sub-regional UN-IGIF yang diselenggarakan di Astana, Kazakhstan, pada tanggal 15 hingga 19 September 2025 dihadiri oleh Dr. Antonius Bambang Wijanarto, dalam kapasitasnya sebagai Presiden UN-GGIM-AP, Anggota High Level Group on IGIF, serta Co-chair International Advisory Committee of UN-GGKIC, hadir untuk memfasilitasi diskusi strategis mengenai penguatan manajemen informasi geospasial guna mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam forum tersebut, Indonesia memberikan kontribusi nyata dengan mempresentasikan studi kasus mengenai aksi iklim dan skema Integrated Land and Administration for Spatial Planning (ILASP) sebagai contoh konkret bagaimana pengelolaan informasi geospasial dapat diintegrasikan dengan penataan ruang dan mitigasi perubahan iklim.

Pertemuan ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tengah dan sekitarnya, seperti minimnya pemahaman mengenai kontribusi informasi geospasial terhadap prioritas nasional yang berdampak pada rendahnya dukungan anggaran, serta adanya kendala teknis dalam membedakan antara Infrastruktur Data Spasial Nasional (NSDI) dengan kerangka kerja UN-IGIF. Sebagai solusi, forum ini menekankan pentingnya peningkatan kolaborasi melalui pengembangan kapasitas teknis, manajerial, dan kepemimpinan, serta pemanfaatan bersama citra satelit untuk menjawab isu-isu global. Selain mengikuti agenda workshop, delegasi juga turut serta dalam perayaan ulang tahun ke-80

Qazgeodezia dan melakukan pertemuan ramah tamah dengan Duta Besar RI untuk Kazakhstan guna memperkuat hubungan bilateral. Seluruh pembiayaan perjalanan dinas ini didukung sepenuhnya oleh The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), yang mencerminkan pengakuan internasional terhadap peran kepemimpinan Indonesia di bidang geospasial.



Gambar 3.5 Expert Consultation and Meeting on Enhancing Geospatial Information

4.6) Kontribusi pada kegiatan UN of Expert on Integration Statistical and Geospatial Information

Indonesia sebagai negara anggota sekaligus Presiden of *United Nation of Global Geospatial Information Management regional Asia Pacific* (UN-GGIM- AP) terlibat dalam berbagai pertemuan regional maupun global. Dalam berbagai kesempatan Indonesia menyampaikan progres dan keterlibatannya dalam implementasi UN-*Integrated Geospatial Information Network* (UN-IGIF) di Indonesia dalam ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), dimana kerangka IGIF membantu meningkatkan kolaborasi antar kementerian/lembaga.

Tahun 2023-2025 Indonesia juga dipercaya sebagai salah satu pemimpin dalam Implementasi Integrasi Spasial Statistik bersama dengan Swedia dan Norwegia pada *UN of Expert on Integration Statistical and Geospatial Information*. Indonesia dipandang sudah bisa

melakukan lompatan yg besar dibandingkan negara negara lain di dunia terkait pemetaan *by name by address*. Selain itu Indonesia juga menjadi anggota dalam UN *Inter-agency and Expert Group on SDGs Indicators (IAEG-SDGs)*, tugasnya membuat kerangka kerja global dalam membangun dan mengimplementasikan indikator SDGs sampai tahun 2030.

Pada bulan November 2024, BIG yang diwakili oleh Direktur DISIGT menjadi pembicara pada *Twenty-ninth Conference of the Parties, the United Nations Framework Convention on Climate Change* di Baku, Azerbaijan (COP-29 Baku Azerbaijan). Data dan informasi memainkan peran penting, seiring dengan semakin dimanfaatkannya teknologi dan digitalisasi untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan mengambil keputusan yang tepat sekaligus meningkatkan efisiensi. Manfaat utama pemanfaatan data dan informasi adalah kemampuan organisasi untuk menganalisis tren dan pola, sehingga mengidentifikasi potensi peluang dan tantangan. Analisis data memungkinkan perumusan kebijakan dan keputusan berdasarkan fakta konkrit dan informasi terkini. Data geospasial diakui sebagai salah satu sumber data yang paling menjanjikan, menawarkan potensi besar untuk melacak dan mengevaluasi kemajuan di berbagai SDGs. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan tepat waktu.

Direktur DISIGT membawakan tema “*Utilization of Thematic Geospatial Information to Strengthen Climate Action Strategies Towards Net Zero Emissions*”.

Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik tentang pemanfaatan informasi geospasial dalam penentuan kebijakan dan strategi aksi iklim. Tujuannya meliputi:

1. Mendemonstrasikan bagaimana informasi geospasial dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan kehutanan dan lingkungan.
2. Melakukan penilaian terhadap kebutuhan dan pemanfaatan informasi geospasial oleh Entitas Nasional dan Internasional sebagai sumber untuk mengevaluasi peta jalan pengembangan infrastruktur informasi geospasial.

BIG ikut berkontribusi dalam kerjasama Indonesia - Norwegia di Kegiatan *Ocean for Development* bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Bulan November tahun 2025 BIG berperan aktif dalam penyusunan *Strategic Planning for Ocean Development* di Oslo Norwegia. BIG mengusulkan peran strategisnya dalam pemetaan karbon biru untuk pembangunan ekonomi.



Gambar 3.6 Kontribusi pada kegiatan UN of Expert on Integration Statistical and Geospatial Information

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja sasaran program Deputy Bidang IGT dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan indikator kerjanya. Setiap indikator dinilai dari tingkat pencapaian (dalam persentase maupun kualitas output/outcome), serta dianalisis faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan maupun ketidaktercapaian kinerja.

Dalam bab ini diuraikan sasaran program yang menjadi fokus Deputy Bidang IGT beserta indikator kinerja sasaran program/kegiatan tahun 2025, yang disajikan secara sistematis untuk memudahkan pengukuran dan interpretasi kinerja. Angka capaian setiap indikator akan disertai dengan contoh-contoh hasil (output dan outcome) yang telah dilaksanakan, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai manfaat program/kegiatan terhadap pemangku kepentingan dan kontribusinya terhadap sasaran strategis organisasi. Selain itu, hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan penajaman rencana kinerja pada tahun berikutnya agar kinerja Deputy Bidang IGT semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2.1 SASARAN PROGRAM

Sasaran program merupakan gambaran kondisi yang harus terpenuhi

dalam rangka mewujudkan strategi organisasi. Sasaran program Deputi Bidang IGT pada Tahun Anggaran 2025 sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) yaitu meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan kinerja yang dilakukan antara pemberi amanah dan penerima amanah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan adanya PK adalah sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan komitmen kinerja aparatur. PK juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian, penghargaan, sanksi dan dasar evaluasi kinerja aparatur. PK Deputi Bidang IGT tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2025.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 DIGT

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Capaian
2.2.Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	IKP 2.2.1	Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat	17%	10%	10,39%	104%
2.9.Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	IKP 2.9.1	Indeks Pelayanan Publik	4,4 (Skala 1-5)	4,4 (Skala 1-5)	4,45 (Skala 1-5)	102,95%
2.10.Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	IKP 2.10.1	Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial	17%	20%	28,13%	141%
	IKP 2.10.2	Indeks Literasi Geospasial Indonesia	2,1 (Skala 1-4)	2,1 (Skala 1-4)	2,95 (Skala 1-4)	138,10%

Indikator Kinerja Program 2.2.1

Dalam periode renstra tahun 2025-2029, capaian kinerja Deputi IGT 2.2.1 adalah Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat.

IGT PENUGASAN PADA DIREKTORAT INTEGRASI & SINKRONISASI IGT

Tujuan dan Dasar Hukum

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan gambaran nyata mengenai hasil integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT), khususnya terkait sejauh mana cakupan wilayah yang telah berhasil diintegrasikan sepanjang tahun anggaran 2025. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi referensi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta upaya peningkatan kualitas integrasi data geospasial di masa depan. Melalui berbagai tema integrasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit dan optimalisasi penerimaan negara dengan mengidentifikasi kesesuaian lahan di kawasan hutan, serta menjamin ketepatan data spasial untuk mendukung perhitungan pajak yang lebih optimal. Selain itu, integrasi ini bertujuan menghasilkan pemodelan distribusi penduduk yang akurat dalam satuan grid serta menyediakan basis data karbon biru yang andal untuk mendukung penyusunan neraca sumber daya alam pesisir serta mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan. Sebagai analogi, tujuan laporan ini ibarat laporan pemeriksaan kesehatan menyeluruh (general check-up) bagi sebuah organisasi; ia tidak hanya menunjukkan angka-angka hasil pemeriksaan (capaian target), tetapi juga memberikan diagnosis yang jelas agar dokter (pemangku kepentingan) dapat meresepkan tindakan atau kebijakan yang paling tepat untuk menjaga kesehatan organisasi tersebut di masa depan.

Dasar hukum untuk kegiatan ini meliputi

- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, yang menetapkan target capaian indikator sebesar 9%.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, yang menyebabkan dilakukannya penyesuaian target lokasi dan strategi pelaksanaan kegiatan akibat kebijakan pemblokiran anggaran.
- Target Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam melakukan evaluasi kesesuaian lahan dan penegakan hukum di kawasan hutan.
- Kebijakan Satu Peta (KSP) yang digunakan sebagai sumber data spasial utama untuk izin usaha perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan tutupan lahan.

- Target Rencana Strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial tahun 2025

Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja untuk IKK 4.1.1 (pada unit terkait dalam hal ini DISGT) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 9.35%. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi kinerja berhasil mencapai 9.35%, sehingga target dinyatakan terpenuhi sepenuhnya. Capaian ini merupakan akumulasi dari integrasi empat tema IGT utama.

Empat Pilar Kegiatan Integrasi IGT

Integrasi data geospasial tahun 2025 mencakup empat bidang strategis:

- Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit: Mengintegrasikan data Hak Guna Usaha (HGU), kawasan hutan, dan tutupan kelapa sawit. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perkebunan di dalam kawasan hutan demi perbaikan tata kelola dan optimalisasi penerimaan negara.

- Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit: Penyusunan peta skala 1:50.000 yang menggabungkan data perizinan (IUP/HGU) dengan data objek pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ini mencakup validasi lapangan, seperti yang dilakukan terhadap 4 NOP di Provinsi Riau.

- Integrasi Spasial-Statistik: Pemodelan distribusi penduduk dalam unit grid berukuran 30x30 meter menggunakan data citra satelit Sentinel-1 dan Sentinel-2. Metode ini memungkinkan disagregasi data penduduk dari tingkat desa ke satuan spasial yang lebih detail.

- Integrasi Karbon Biru: Pemetaan ekosistem mangrove dan lamun sebagai penyerap karbon (CO₂). Di Kecamatan Tirtayasa, Serang, total stok karbon yang teridentifikasi mencapai 167.511,09 Mg C, di mana ekosistem mangrove memberikan kontribusi terbesar.

Kendala dan Penyesuaian Strategis

Tahun anggaran 2025 diwarnai oleh kebijakan efisiensi belanja pemerintah (Inpres No. 1 Tahun 2025). Hal ini berdampak pada:

- Pemblokiran anggaran: Kegiatan IGT Karbon Biru sempat mengalami blokir anggaran total, namun tetap dilaksanakan dengan penyesuaian lokasi ke wilayah yang lebih efisien secara logistik, yaitu di Kabupaten Serang.

- Pengurangan cakupan: Kegiatan Spasial-Statistik yang semula ditargetkan mencakup seluruh Pulau Jawa harus disesuaikan menjadi hanya sebagian wilayah Jawa karena efisiensi tersebut.

Metodologi dan Validasi

Setiap kegiatan menggunakan tahapan teknis yang ketat, mulai dari persiapan dan koordinasi antar-Kementerian/Lembaga, integrasi data, hingga validasi lapangan. Pengolahan data dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan model regresi untuk memastikan akurasi data.

Kesimpulan: Meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran, BIG berhasil mencapai target integrasi IGT 2025 melalui pendekatan adaptif dan kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung kebijakan satu peta dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.



Gambar 3.7 Kegiatan IGT Penugasan pada Direktorat Integrasi & Sinkronisasi IGT

IGT PENUGASAN PADA DIREKTORAT PEMETAAN TEMATIK

Tujuan dan Dasar Hukum

Penyelenggaraan IGT ini dilakukan oleh Direktorat Pemetaan Tematik (DPT) BIG untuk memenuhi kebutuhan data spasial yang akurat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dasar hukum utamanya meliputi UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (yang direvisi menjadi UU No. 6 Tahun 2023) dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Lokasi dan Metodologi Kegiatan

- Lokasi: Kegiatan tahun 2025 mencakup 12 Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
- Tahapan Kerja: Meliputi persiapan, pengumpulan data (internal BIG dan eksternal K/L), survei lapangan (dua tahap untuk validasi), hingga finalisasi dokumen.
- Inovasi Metode: Dilakukan pemutakhiran metode dari SNI 8197:2015 ke metode Modified Geomorphic Flood Index (GFI). Metode ini lebih efisien karena mengintegrasikan parameter fisik Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti tutupan lahan, tekstur tanah, dan curah hujan efektif untuk menghasilkan peta yang dinamis.

Capaian Kinerja Tahun 2025

- Target Output: Terdiri dari IGT Bahaya Banjir seluas 22.592 km² dan IGT Sistem Lahan seluas 392 km².
- Realisasi: Penyelenggaraan IGT Bahaya Banjir mencapai 100% dari target (22.592 km²), sedangkan IGT Sistem Lahan tidak terlaksana karena adanya blokir anggaran.
- Skor Indikator: Berdasarkan rumus perhitungan rasio terhadap total cakupan wilayah nasional, capaian e-performance untuk IKK 4.1.2 (pada unit terkait dalam hal ini DPT) adalah sebesar 1,19%.

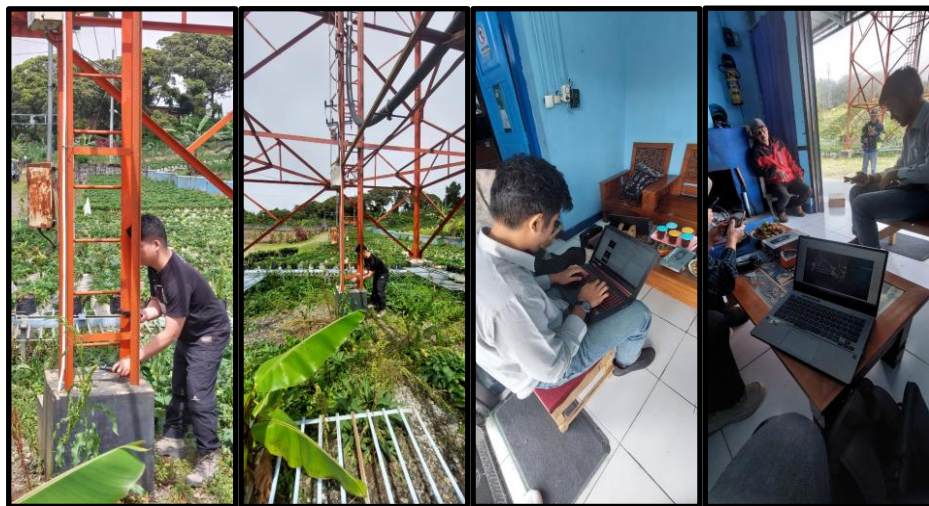
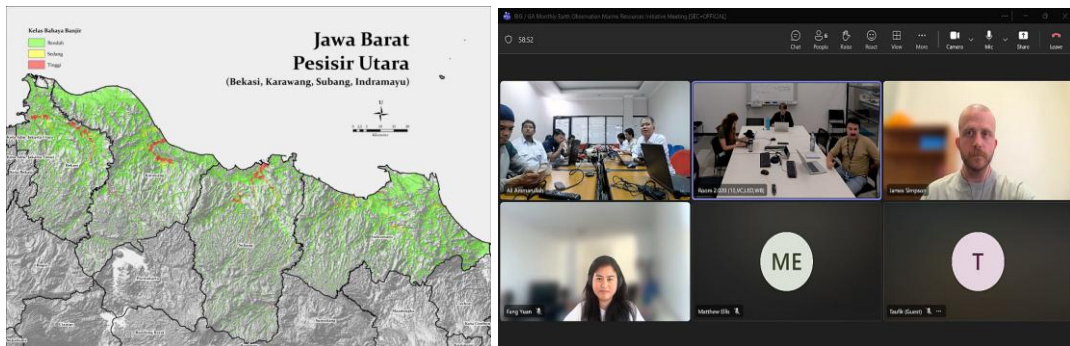
Kendala dan Solusi

Kendala Utama: Adanya blokir dan efisiensi anggaran, terutama blokir 100% pada kegiatan IGT Sistem Lahan yang menghambat rencana awal.

Solusi: BIG melakukan penyesuaian skema penyusunan, mengoptimalkan koordinasi serta FGD dengan akademisi, dan memutuskan untuk tidak menghitung IGT Sistem Lahan dalam capaian kinerja organisasi karena anggaran nol rupiah.

Kesimpulan: Meskipun terdapat tantangan anggaran, Direktorat Pemetaan Tematik berhasil menyelesaikan target Peta Bahaya Banjir di 12 wilayah prioritas dengan akurasi yang diuji menggunakan metode Area Under Curve (ROC).

Sebagai analogi, penyusunan peta rawan banjir ini ibarat membuat sistem peringatan dini di sebuah gedung besar; tim tidak hanya melihat sejarah kerusakan di masa lalu, tetapi juga menganalisis struktur bangunan dan potensi beban air yang bisa masuk agar dapat menentukan area mana yang paling berisiko saat badai datang.



Gambar 3.7 Kegiatan IGT Penugasan pada Direktorat Pemetaan Tematik

IGT PENUGASAN PADA DIREKTORAT ATLAS DAN PENGGUNAAN IG

Profil indikator dan tujuan

- Indikator ini mengukur persentase cakupan luas wilayah darat Indonesia yang sudah tercakup dalam produk Atlas dan terapan informasi geospasial yang diselenggarakan Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial.
- Indikator bersifat proxy, dikendalikan tinggi (high control), dan berpolaritas “maximize” karena semakin luas cakupan wilayah, semakin baik kinerja terhadap sasaran meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir yang ditugaskan kepada BIG.

Ruang lingkup tema dan target luasan

- Tema yang dihitung meliputi: Atlas Taktual (2025–2029), Atlas Pariwisata (2025), Atlas Kewilayahan untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (2025–2029), dan Data/Informasi Geospasial untuk Aksi Iklim (2026–2028).
- Total target luasan wilayah seluruh tema adalah 10.828.154 km², dengan rincian target: Atlas Taktual 352.868 km², Atlas Pariwisata 42.294 km², Atlas Kewilayahan 9.456.530 km², dan Aksi Iklim 976.462 km².

Perhitungan capaian 2025

- Capaian luasan kumulatif sampai 2025 adalah: Atlas Taktual 304.601,93 km², Atlas Pariwisata 37.299 km², dan Atlas Kewilayahan 1.891.306 km², sehingga total capaian luas wilayah menjadi 2.233.206,93 km².
- Persentase capaian dihitung dengan rumus $\text{capaian} = \frac{\text{total capaian luas wilayah s.d. tahun berjalan}}{\text{total target luasan wilayah}} \times 100\%$. Capaian = $\frac{2.233.206,93}{10.828.154} \times 100\%$, menghasilkan 20,62% dari target 10.828.154 km².

Pelaksanaan rencana aksi

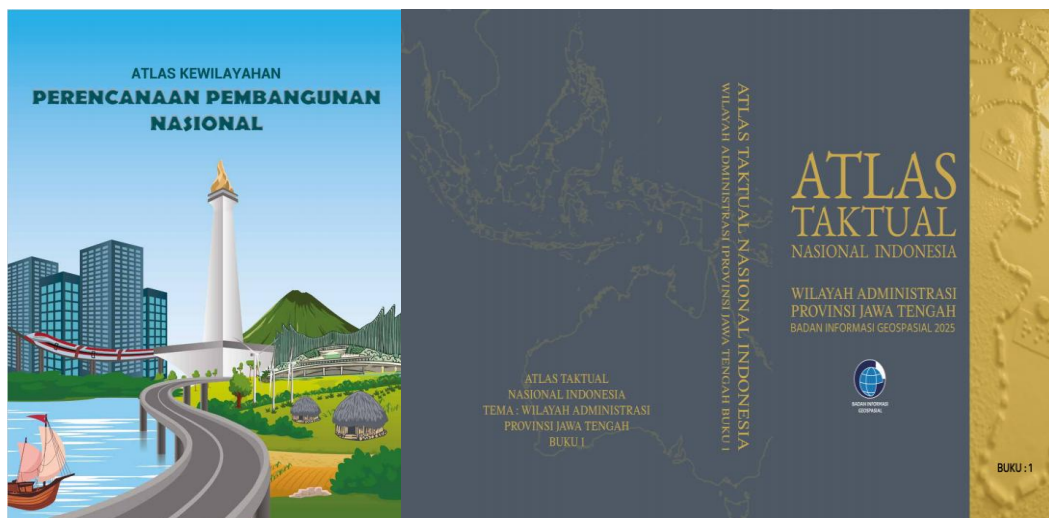
- Seluruh rencana aksi yang dijadwalkan telah dilaksanakan sesuai target, yaitu: penyusunan rencana kerja kegiatan atlas, pengumpulan dan penyusunan peta, pengolahan data dan uji atlas, serta penyusunan produk atlas (masing masing 2 laporan).
- Bukti pelaksanaan termasuk 2 laporan penyusunan produk Atlas, yaitu Atlas Taktual Indonesia (Jawa Tengah) dan Atlas Kewilayahan untuk Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mendukung kenaikan luasan cakupan pada 2025.

Kesimpulan

- Dengan capaian 20,62% terhadap target 20%, kinerja IKK 4.1.3 (pada unit terkait dalam hal ini DAPIG) tahun 2025 dinilai telah memenuhi dan sedikit melampaui sasaran yang ditetapkan untuk cakupan wilayah atlas dan terapan informasi geospasial.
- Kriteria keberhasilan "DAPIG mencapai persentase cakupan sesuai target" terpenuhi, dan capaian 2025 menjadi dasar peningkatan progres cakupan untuk tahun tahun berikutnya dalam periode 2025–2029.



Gambar 3.8 Pelaksanaan Uji Pemaknaan Atlas Taktual dan Rilis Peta NKRI



Gambar 3.9 Halaman Sampul Buku Atlas

PERHITUNGAN IKP 2.2.1

1. IGT hasil integrasi yang dihasilkan oleh DISIGT:
 - Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
 - Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit
 - Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik
 - Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru
2. Target cakupan nasional tiap IGT yaitu:
 - Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit = 8.248 Km² yang merupakan target Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

- Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit = 26.508 Km² yang merupakan luas tutupan kelapa sawit Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.
- Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik = 133.157 Km² terdiri dari Kota Bogor sebagai Pilot Project Penyusunan Spesifikasi Produk Data (SPD).
- Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru = 8.935 km² dari luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KPPD) di Provinsi Banten, Lampung, Jawa Tengah, NTB, dan Bali.

3. Capaian cakupan luasan wilayah tiap IGT yaitu:

- Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan tahun berjalan = 2.160 Km²
- Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan tahun berjalan = 2.773 Km²
- Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik sampai dengan tahun berjalan = 111 km²
- Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru sampai dengan tahun berjalan = 58 Km²

4. Menghitung Persentase rata-rata cakupan wilayah IGT hasil integrasi yang diselenggarakan oleh DISIGT (Capaian IGT A):

$$= \frac{\left(\frac{3a}{2a} + \frac{3b}{2b} + \frac{3c}{2c} + \frac{3d}{2d}\right)}{4} \times 100\%$$

5. Identifikasi cakupan wilayah IGT yang dihasilkan oleh Direktorat Pemetaan Tematik pada tahun berjalan:

- a. Baseline s.d 2025 + Peta Sistem Lahan
- b. Baseline s.d 2025 + Peta Bahaya Banjir
- c. Baseline s.d 2025 + Peta Gumuk Pasir

6. Luas total wilayah cakupan setiap IGT:

- a. IGT Sistem Lahan 11.849 km² wilayah prioritas RDTR.
- b. IGT Bahaya Banjir 1.891.306 km².
- c. Peta Gumuk Pasir 4,12 km².

7. Menghitung persentase cakupan wilayah IGT (Capaian IGT B): $= A/B \times 100\%$

Keterangan:

- a. A: $(1a+1b+1c)$
- b. B: $(2a+2b+2c)$

8. Persentase cakupan wilayah tiap tema atlas atau terapan IG adalah perbandingan antara cakupan wilayah atlas tiap tema atau terapan IG yang telah diselesaikan sampai dengan tahun berjalan (akumulatif) dibagi total luasan cakupan wilayah atlas/terapan IG secara nasional tiap tema atlas/terapan IG

9. IGT Tema ATLAS/Terapan IG adalah (7 tema):

- a. Atlas Taktual (2025)
- b. Atlas Pariwisata (2025)
- c. Atlas Kewilayahan (2025)
- d. Data dan Informasi Geospasial untuk Aksi Iklim (2026-2028)

10. Capaian luasan Cakupan wilayah Atlas sampai dengan Tahun 2024:

- a. Atlas Taktual = 209.606 km²
- b. Atlas Pariwisata = 37.299 km²

11. Menghitung target luasan cakupan wilayah per tema atlas secara keseluruhan (jumlah target luasan cakupan wilayah secara nasional), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Atlas Taktual = 352,868km²
- b. Atlas Pariwisata = 42,294 km²
- c. Atlas Kewilayahan untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (2025) = 9.456.530 km²
- d. Data dan Informasi Geospasial untuk Aksi Iklim = 976.462 km²

12. Menghitung persentase Tema Atlas dan terapan IG (Capaian IGT C):

$$= \frac{\text{total capaian luasan wilayah tahun berjalan}}{\text{total target luasan wilayah}} \times 100\%$$

13. Persentase rata-rata cakupan IGT penugasan dihitung menggunakan rumus:

$$= \frac{(\% \text{ capaian IGT A} + \% \text{ capaian IGT B} + \% \text{ capaian IGT C})}{3}$$

DISIGT		
2. Target cakupan nasional tiap IGT yaitu:		
		176,848
a. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	8,248	8,248
b. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit	26508	26508
c. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik	133157	133157
d. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru	8935	8935
3. Capaian cakupan luasan wilayah tiap IGT yaitu:		
		5,102
a. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan tahun berjalan	2,160	2,160
b. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan tahun berjalan	2773	2773
c. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik sampai dengan tahun berjalan	111	111
d. Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru sampai dengan tahun berjalan	58	58
FORMULA IGT A		9.35%
DPT		
1. Identifikasi cakupan wilayah IGT yang dihasilkan oleh Direktorat Pemetaan Tematik pada tahun berjalan:		

a. Peta Sistem Lahan	392	0
b. Peta Bahaya Banjir	22592	22592
c. Peta Gumuk Pasir	0	0
2. Luas total wilayah cakupan setiap IGT:		
a. IGT Sistem Lahan 11.849 km ² wilayah prioritas RDTR.	11849	0
b. IGT Bahaya Banjir 1.891.306 km ² .	1891306	22592
c. Peta Gumuk Pasir 4,12 km ² .	4.12	0
FORMULA IGT B		
1.19		1.19%
DAPIG		
Tema Atlas Terapan Luasan		2,233,206
a. Atlas Taktual (2025)		304,601
b. Atlas Pariwisata (2025)		37,299
c. Atlas Kewilayahan (2025)		1,891,306
Target Atlas Terapan		10,828,154
a. Atlas Taktual = 352868 km ²		352,868
b. Atlas Pariwisata = 42294 km ²		42,294
c. Atlas Kewilayahan untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (2025) = 9.456.530 km ²		9,456,530
d. Data dan Informasi Geospasial untuk Aksi Iklim = 976.462 km ²		976,462
FORMULA IGT C		
	20%	20.62%
Presentasi Rata-Rata IKP 2.2.1		
		10.39%

Integrasi IGT oleh DISIGT

- Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT mencapai target IKK 4.1.1 sebesar 9.35%, sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, melalui integrasi empat tema utama: kesesuaian lahan sawit, KAS PBB P5, spasial-statistik, dan karbon biru.
- Integrasi ini mendukung perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit, optimalisasi penerimaan negara, pemodelan distribusi penduduk berbasis grid, dan penyediaan basis data karbon biru untuk neraca sumber daya alam dan mitigasi iklim.

IGT penugasan Direktorat Pemetaan Tematik

- Direktorat Pemetaan Tematik menyelenggarakan IGT untuk mendukung RTRW/RDTR di 12 kabupaten/kota, dengan inovasi metode Modified Geomorphic Flood Index (GFI) untuk Peta Bahaya Banjir skala 1:50.000.
- Target IGT Bahaya Banjir seluas 22.592 km² tercapai 100%, sedangkan IGT Sistem Lahan tidak terlaksana akibat blokir anggaran; capaian IKK 4.1.2 secara e-performance tercatat 1,19% dan IGT Sistem Lahan tidak dihitung dalam kinerja karena anggaran nol.

IGT penugasan Direktorat Atlas dan Penggunaan IG

- Indikator cakupan wilayah Atlas dan terapan IG (IKK 4.1.3) mengukur porsi luas darat Indonesia yang tercakup dalam Atlas Taktual, Atlas Pariwisata, Atlas Kewilayahan, dan Data/Informasi Geospasial Aksi Iklim.
- Dengan capaian kumulatif 2.233.206,93 km² dari total target 10.828.154 km², persentase kinerja mencapai 20,62%, sedikit melampaui target 20% dan memenuhi kriteria keberhasilan DAPIG.

Dampak kebijakan anggaran dan penyesuaian

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara menyebabkan pemblokiran dan penyesuaian ruang lingkup, terutama pada IGT Karbon Biru serta pengurangan cakupan spasial-statistik dari seluruh Jawa menjadi sebagian wilayah, dan pembatalan IGT Sistem Lahan.
- BIG merespons melalui penyesuaian lokasi (misalnya fokus Karbon Biru di Kabupaten Serang), optimalisasi koordinasi lintas K/L, dan penajaman prioritas sehingga target indikator tetap tercapai meskipun output tematik tertentu dikurangi.

Gambaran umum capaian IKP 2.2.1

- Secara metodologis, laporan menetapkan rumus agregasi untuk tiga kelompok capaian: IGT hasil integrasi (A), IGT DPT (B), dan IGT Atlas/Terapan IG (C), dengan persentase rata-rata dihitung sebagai $(\%A+\%B+\%C)/3$ seperti pada **table didapat nilai 10.39%**.
- Keseluruhan kinerja menunjukkan bahwa integrasi, pemetaan tematik, dan atlas/terapan IG memberikan kontribusi terukur terhadap sasaran Renstra BIG 2025–2029, sekaligus memperkuat implementasi Kebijakan Satu Peta dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Indikator Kinerja Program 2.9.1

Dalam periode renstra tahun 2025-2029, capaian kinerja Deputy IGT adalah Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

1. Kebijakan Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial (PTIG)

BIG telah mengintegrasikan layanannya melalui Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial (PTIG) untuk memberikan akses satu pintu yang cepat, mudah, dan berkualitas. Saat ini, BIG menerapkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), di mana setiap unit kerja teknis memberikan layanan di satu tempat. Namun, terdapat beberapa kendala operasional yang diidentifikasi, seperti:

- Belum adanya staf khusus (*dedicated*) di setiap pusat teknis untuk pelayanan.
- Sistem informasi yang belum terintegrasi sepenuhnya antara direktorat teknis dengan PTIG.
- Masalah pembayaran non-tunai yang terkadang sulit dilakukan oleh pengguna.
- Rencana ke depan mencakup empat tahap transformasi, mulai dari peningkatan keterpaduan hingga penguatan siklus pemanfaatan jasa/produk geospasial.

2. Standar Pelayanan Publik

Hingga triwulan ketiga 2025, BIG mengidentifikasi total 74 jenis layanan yang diselenggarakan oleh 12 unit kerja. Dari jumlah tersebut, baru 41 layanan (55,41%) yang memiliki Standar Pelayanan (SP) resmi. Sebanyak 4 unit kerja belum memiliki SP karena merupakan unit baru hasil restrukturisasi organisasi tahun 2024. BIG menargetkan agar pada tahun 2026, seluruh unit kerja wajib memiliki Standar Pelayanan untuk semua jenis layanan mereka.

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Kinerja Nasional

Pengukuran kinerja pelayanan dilakukan melalui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

- Evaluasi Mandiri: BIG melakukan evaluasi mandiri terhadap 5 Unit Lokus Evaluasi (ULE), dengan hasil rata-rata 4,53 (Kategori A - Pelayanan Prima). Skor tertinggi diraih oleh Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial (4,75).

- Kinerja Nasional: Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, BIG memperoleh nilai IPP nasional sebesar 4,45, yang menempatkan instansi ini pada peringkat 37 dari 93 Kementerian/Lembaga.

4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tingkat kepuasan masyarakat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan total 371 responden selama tahun 2025.

- Skor Akhir: Nilai IKM mencapai 3,80 (95,00%), meningkat signifikan dari tahun 2024 yang hanya 3,65. Ini masuk dalam Mutu Pelayanan A (Sangat Baik).

- Analisis Atribut: Atribut dengan nilai tertinggi adalah perilaku petugas (kesopanan dan keramahan) dengan skor 3,80. Sebaliknya, kecepatan waktu layanan menjadi atribut dengan skor terendah (3,71).

- Prioritas Perbaikan: Berdasarkan analisis kuadran, penyederhanaan prosedur pelayanan diidentifikasi sebagai prioritas utama yang harus diperbaiki karena dianggap penting oleh masyarakat namun kinerjanya masih perlu ditingkatkan.

5. Forum Konsultasi Publik (FKP)

BIG secara rutin menyelenggarakan FKP sejak 2021 untuk menyelaraskan kebijakan dengan harapan publik. Fokus utama FKP 2025 adalah:

- Mewujudkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dengan mensinkronkan data antar portal layanan (seperti portal MOMI dengan One Map BIG).

- Pengembangan *One Map Value* untuk mendukung penilaian pajak yang lebih akurat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- Pemenuhan kebutuhan data citra satelit time series terbaru untuk penyusunan rencana tata ruang (RDTR/RTRW).

6. Inovasi Pelayanan Publik

BIG berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 dengan mengirimkan 6 proposal inovasi.

- Hasil Seleksi: Sebanyak 4 inovasi lolos seleksi administrasi, namun tidak ada yang berhasil masuk sebagai finalis karena nilai yang diperoleh masih di bawah ambang batas minimal (85,00).

- Capaian Tertinggi: Inovasi Geoportal PALAPA 5.0 meraih skor tertinggi bagi BIG yakni 69,78.

- Rekomendasi: Untuk kompetisi mendatang, BIG perlu menekankan pada aspek kebaruan (novelty), efektivitas, dampak konkret bagi masyarakat, serta kemampuan inovasi untuk direplikasi oleh instansi lain.

7. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Terdapat 175 pengaduan yang masuk selama tahun 2025 melalui berbagai kanal, terutama Email (52,6%) dan WhatsApp (45,1%).

- Masalah Utama: Kendala yang paling dominan adalah masalah unduh data (114 aduan), khususnya pada sistem SRGI dan InaGeoportal. Masalah lain meliputi kendala akun (36 aduan) dan keamanan situs seperti penyusupan situs judi online (7 aduan).

- Tindak Lanjut: Seluruh 175 pengaduan (100%) telah berhasil diselesaikan melalui koordinasi tim teknis di Direktorat SRG dan Direktorat STIG.

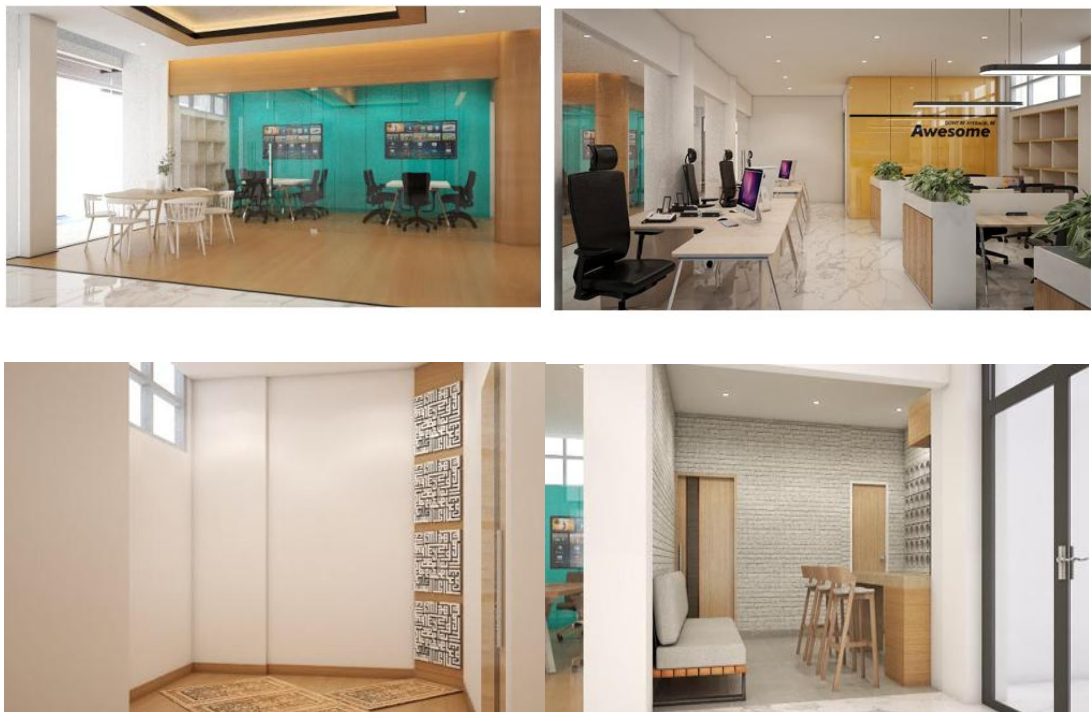
Kesimpulan: BIG telah menunjukkan komitmen kuat dalam transparansi dan peningkatan kualitas layanan, namun tantangan besar masih ada pada integrasi sistem digital secara menyeluruh dan kecepatan prosedur birokrasi guna mempertahankan predikat Pelayanan Prima di masa mendatang

Kesimpulan


Selama 2025 terdapat 175 pengaduan yang diterima melalui kanal informasi PTIG, baik melalui e-mail info@big.go.id, whatsapp 08111195005, instagram dan SP4N Lapo!. Pengguna layanan yang memberikan pengaduan mayoritas berasal dari sektor swasta. Berdasarkan kategorinya, layanan SRGI dan InaGeoportal menjadi yang paling banyak mendapatkan aduan. Sedangkan berdasarkan kendalanya, kendala unduh data dan kendala akun menjadi dua jenis masalah yang paling banyak mendapatkan pengaduan.

Layanan melalui aplikasi SRGI dan aplikasi InaGeoportal menjadi dua aplikasi yang paling banyak diakses oleh pengguna layanan. Berbagai permasalahan yang terjadi seperti kendala server maupun proses *maintenance* perlu menjadi perhatian bagi unit pengelola, khususnya Direktorat SRG dan Direktorat STIG agar lebih baik. Mitigasi risiko perlu disusun dan dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya kendala. Sebagai konsekuensinya, petugas pelayanan harus lebih kompeten dan memberikan *feedback* atau respon setelah diterimanya pengaduan dengan tetap berkoordinasi dengan unit terkait melalui Tim Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial.

Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti dengan baik. Ke depannya perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan unit teknis penerima pengaduan untuk membahas lebih lanjut mengenai berbagai kendala yang dialami oleh pengguna, khususnya pada kendala yang sering terjadi. Harapannya, kendala yang dialami oleh pengguna layanan dapat diminimalisasi atau tidak terjadi kembali di kemudian hari. Nilai yang didapatkan berdasarkan keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 adalah 4.45 peringkat 37 dari tota; 93 K/L/P.



Gambar 3.10 Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan pelayanan di BIG


MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir hasil penilaian; dan
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); dan
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal, 9 Januari 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,


N. WIDYANTINI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH
TAHUN 2025

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Badan Pusat Statistik	4.92	A
2	Kementerian Keuangan	4.87	A
3	Kementerian Kesehatan	4.87	A
4	Kejaksaan Agung	4.85	A
5	Kementerian Komunikasi dan Digital	4.80	A
6	Tentara Nasional Indonesia	4.80	A
7	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	4.80	A
8	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	4.80	A
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.80	A
10	Badan Riset Dan Inovasi Nasional	4.77	A
11	Badan Narkotika Nasional	4.77	A
12	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	4.77	A
13	Badan Kepegawaian Negara	4.76	A
14	Kementerian Dalam Negeri	4.76	A
15	Kementerian Pertanian	4.75	A
16	Ombudsman Republik Indonesia	4.72	A
17	Kementerian Pekerjaan Umum	4.68	A
18	Kementerian Pemuda dan Olahraga	4.67	A
19	Kementerian Sosial	4.66	A
20	Komisi Pemilihan Umum	4.66	A
21	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	4.62	A
22	Kementerian Pariwisata	4.61	A
23	Kementerian Agama	4.61	A
24	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4.61	A
25	Lembaga Administrasi Negara	4.59	A

Gambar 3. 11 Keputusan Menteri PAN RB terkait Hasil Evaluasi PEKPP

Indikator Kinerja Program 2.10.1

1. Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial

Penggunaan Informasi Geospasial (IG) membantu memahami kondisi wilayah untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan. IG dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk berbagai bidang seperti tata ruang, sumber daya alam, mitigasi bencana, hingga pendidikan. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyediakan data dan informasi IG melalui platform e-Atlas (atlas.big.go.id), sebuah aplikasi web dan mobile berisi atlas multitema yang dapat diakses publik. E-Atlas mendukung monitoring dan evaluasi pemanfaatan IG serta menjadi indikator keberhasilan strategi BIG dalam Renstra 2025–2029, yang berfokus pada peningkatan ketersediaan, keterpakaian, dan kapasitas pengguna IG guna memperkuat pembangunan dan pelayanan publik berbasis spasial.

Berikut adalah cara perhitungan untuk pengguna informasi geospasial

1. Menentukan target pengguna IG yang menggunakan produk atlas pada akumulasi tahun berjalan, kemudian disebut X
2. Menentukan target total pengguna IG selama lima tahun, kemudian disebut Y
3. Target pengguna IG selama lima tahun adalah 1500 pengguna.
4. Menghitung persentase pengguna IG dengan rumus:
5. Rumus % Pengguna IG = $X/Y \times 100\%$
6. Berikut adalah data log pengguna IG di tahun 2025 [Log. Download e-Atlas](#)

Kesimpulan

Data log pengguna tahun 2025 menggambarkan bahwa platform e-Atlas benar-benar dimanfaatkan oleh beragam pemangku kepentingan (instansi pemerintah, daerah, komunitas, dan individu) sebagai rujukan informasi spasial dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Aktivitas ini sejalan dengan peran e-Atlas sebagai media penyebaran atlas multitema yang mudah diakses secara digital.

Berdasarkan mekanisme perhitungan, jumlah pengguna kumulatif tahun berjalan (X) yang terekam dalam log menjadi dasar pengukuran persentase capaian terhadap target lima tahunan 1.500 pengguna (Y), sehingga menggambarkan kemajuan pencapaian indikator kinerja penggunaan IG melalui atlas. Nilai yang didapat adalah 28.13% yang mana nilai tersebut mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, log 2025 berfungsi sebagai bukti kuantitatif bahwa penggunaan atlas di e-Atlas telah berkontribusi nyata terhadap pemenuhan target IKP 2.10.1 dan penguatan ekosistem geospasial nasional.

Indikator Kinerja Program 2.10.2

Dalam periode renstra tahun 2025-2029, capaian kinerja Deputi IGT 2.10.2 adalah Indeks Literasi Geospasial

Pendahuluan dan Capaian Strategis

Literasi geospasial didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam menafsirkan, menggunakan, dan menyajikan data serta informasi geospasial. Hal ini tidak hanya terbatas pada keterampilan membaca peta, tetapi juga mencakup pemahaman sistem interaksi manusia dengan alam, penalaran geografis, serta pengambilan keputusan berbasis aspek spasial. Pada tahun 2025, Indonesia berhasil mencapai nilai Indeks Literasi Geospasial sebesar 2,95 (skala 1–4). Angka ini dikategorikan "Baik" dan telah melampaui target Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 2,4.

Tim Kerja Penyusunan Indeks

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: B-4.3/DIGT/KP.03.01/3/2025, tim yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- Ketua: Dheny Trie Wahyu Sampurno (Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial)

- Anggota:

- Dwi Maryanto (Surveyor Pemetaan Ahli Madya)
- Gunawan (Surveyor Pemetaan Ahli Madya)
- Ninuk Christina Anggraeni (Surveyor Pemetaan Ahli Madya)
- Doddy Mendro Yuwono (Surveyor Pemetaan Ahli Madya)
- Fandy Tri Admajaya (Surveyor Pemetaan Ahli Madya)
- Wulan Yustia Sahroni (Surveyor Pemetaan Ahli Muda)
- Risa Krisadhi (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama)
- Anifa Widiyantari (Surveyor Pemetaan Ahli Muda)
- Marhensa Aditya Hadi (Surveyor Pemetaan Ahli Muda)
- Chintia Dewi (Surveyor Pemetaan Ahli Muda)
- Tia Rizka Nuzula Rachma (Penelaah Teknis Kebijakan)
- Erna Kusumawati (Surveyor Pemetaan Ahli Muda)
- Fahrul Hidayat (Surveyor Pemetaan Ahli Muda)

3. Metodologi dan Profil Responden

Pengukuran indeks dilakukan melalui tiga pilar utama dengan pembobotan sebagai berikut: Pengetahuan (40%), Keterampilan (30%), dan Budaya (30%). Survei ini melibatkan 838 responden dari 37 provinsi di Indonesia. Profil responden didominasi oleh:

- Jenis Kelamin: Perempuan (57,28%).

- Pendidikan: Lulusan S1/D4.
- Usia: 25–39 tahun dan 40–55 tahun.
- Pekerjaan: Tenaga Pendidik (Guru/Dosen) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Domisili Terbanyak: Provinsi Jawa Barat (207 responden).

4. Analisis Hasil per Pilar

- Pilar Pengetahuan (Nilai: 3,07): Masyarakat sangat baik dalam membaca lokasi di peta, namun masih memiliki pemahaman yang rendah terkait simbol legenda.
- Pilar Keterampilan (Nilai: 3,03): Skor tertinggi ada pada kemampuan mencari jarak antar lokasi menggunakan peta digital. Namun, kemampuan membuat denah atau peta sederhana dengan tulisan tangan masih tergolong lemah.
- Pilar Budaya (Nilai: 2,70): Merupakan pilar terendah. Meskipun masyarakat merasa terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan harian (seperti navigasi), informasi geospasial masih jarang digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan atau keputusan penting.

5. Contoh Kuesioner (*Sample*)

Kuesioner dibagi menjadi empat bagian utama dengan pilihan jawaban skala Likert. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang diajukan kepada responden:

Bagian 1: Pengetahuan (Knowledge)

- Identifikasi Lokasi: "Berdasarkan peta, Bandara Sultan Iskandar Muda berada di...?" (Pilihan: Provinsi Aceh, Kab. Aceh Besar, dll.).
- Pemahaman Simbol: "Apakah Anda mengetahui arti simbol jenis batuan (Alluvium, Beku, Metamorf, Sedimen) pada peta yang ditampilkan?" (Skala: Tidak Tahu - Sangat Tahu).
- Kelembagaan: "Apakah Anda mengetahui bahwa Badan Informasi Geospasial adalah lembaga yang menyelenggarakan IGD dan IGT?".

Bagian 2: Keterampilan (Skills)

- Navigasi Digital: "Saya dapat mencari jarak satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan peta digital." (Skala: Tidak Bisa - Sangat Bisa).
- Pembuatan Peta: "Saya dapat membuat denah atau peta sederhana menggunakan tulisan tangan.".
- Analisis Data: "Saya dapat melakukan analisis data menggunakan perangkat lunak pengolah data geospasial seperti QGIS, ArcGIS, atau Global Mapper.".

Bagian 3: Budaya (Culture)

- Efisiensi Harian: "Apakah informasi geospasial membantu Anda menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas harian (contoh: mengecek rute tercepat di Google Maps)?".
- Kesadaran Privasi: "Apakah Anda memahami bahwa data lokasi individu terikat dengan kebijakan privasi sehingga harus dilindungi?".

- Pengambilan Keputusan: "Saya terbantu dengan informasi potensi sumber daya suatu daerah (melalui Atlas/peta tematik) untuk membantu pengambilan keputusan/kebijakan."

Bagian 4: Identitas Responden

- Nama, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, dan Domisili.

Kesimpulan

Laporan ini menyimpulkan bahwa meskipun pengetahuan teknis masyarakat sudah cukup kuat, tantangan utama terletak pada membangun budaya penggunaan data geospasial yang lebih mendalam dalam proses birokrasi dan pengambilan keputusan strategis di Indonesia.

3.3. REALISASI ANGGARAN

3.3.1 PENGANGGARAN

Pada tahun 2025, pagu anggaran Deputy Bidang IGT sebesar Rp.7.558.804.000,-. Detail alokasi anggaran per Rincian Output sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Pagu Alokasi Anggaran Deputy Bidang IGT Per Rincian Output Tahun 2025

Rincian Output		Pagu
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial		
6447	Pembinaan Penyelenggaraan IGT dan Pengguna Informasi Geospasial	4.461.822.000
PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	3.658.602.000
PBT.001	Pembinaan Penyelenggaraan IGT	2.214.137.000
PBT.002	Kompilasi dan Integrasi IGT	1.071.943.000
PBT.003	IGT Termanfaatkan	372.522.000
PBS	Kebijakan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	350.000.000
PBS.001	Rekomendasi Konsep Platform Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP)	350.000.000
FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	453.220.000
FBA.002	Pembinaan Pemanfaatan Data Geospasial (DG) Dan Informasi Geospasial (IG) Kepada Pemerintah Daerah Untuk Perencanaan Pembangunan	453.220.000
7063	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik	2.072.247.000
CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	2.072.247.000
CBO.017	IGT Bahaya Banjir	794.814.000
CBO.005	IGT Integrasi Spasial-Statistik Wilayah Jawa	25.840.000
CBO.011	Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru Kalimantan, Bali, Nusra	57.828.000

CBO.015	Integrasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	301.988.000
CBO.016	IGT Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit pada skala 1:50.000	105.228.000
CBO.004	Atlas Taktual Indonesia (Jawa Tengah)	379.649.000
CBO.022	Atlas Kewilayahan untuk Perencanaan Pembangunan Nasional	406.900.000
6449	Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial	1.019.735.000
BMA	Data dan Informasi Publik	1.019.735.000
BMA.001	Layanan Produk Eksternal Bidang Informasi Geospasial	60.362.000
BMA.002	Layanan Jasa Eksternal Bidang Informasi Geospasial	519.554.000
BMA.003	Layanan Data dan Informasi	439.819.000
Sumber : SAKTI, Desember 2025 ; https://sakti.kemenkeu.go.id/		

3.3.2 PELAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2025, penetapan pagu anggaran Deputy Bidang IGT mengalami 3 (tiga) kali revisi DIPA DJA, 3 (tiga) kali revisi DIPA Kanwil, 2 (dua) kali revisi POK.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dari total anggaran Deputy IGT sebesar 7.553.808.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.6.999.981,- atau sebesar 92.67%. Dari total anggaran, Rp. 6.623.888.000 merupakan rupiah murni yang terealisasikan 99.17%, Pinjaman Luar Negeri Rp. 350.000.000 terealisasikan 99.99%, dan PNBK Rp. 579.916.000 yang terealisasikan 13.96%.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran DBIGT per Rincian Output TA 2025

Rincian Output		Pagu	Realisasi	%
	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	7.553.804.000	6.999.981.987	92.67
6447	Pembinaan Penyelenggaraan IGT dan Pengguna Informasi Geospasial	4.461.822.000	4.424.070.041	99.15
PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	3.658.602.000	3.621.138.527	98.97
PBT.001	Pembinaan Penyelenggaraan IGT	2.214.137.000	2.214.133.940	99.99
PBT.002	Kompilasi dan Integrasi IGT	1.071.943.000	1.035.014.8500	96.56
PBT.003	IGT Termanfaatkan	372.522.000	371.989.737	99.86
PBS	Kebijakan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	350.000.000	349.987.641	99.99
PBS.001	Rekomendasi Konsep Platform Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP)	350.000.000	349.987.641	99.99
FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	453.220.000	452.943.873	99.94
FBA.002	Pembinaan Pemanfaatan Data Geospasial (DG) Dan Informasi Geospasial (IG) Kepada Pemerintah Daerah Untuk Perencanaan Pembangunan	453.220.000	452.943.873	99.94
7063	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik	2.072.247.000	2.072.247	99.19
CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	2.072.247.000	2.072.247	99.19
CBO.017	IGT Bahaya Banjir	794.814.000	794.811.750	99.99

Rincian Output		Pagu	Realisasi	%
CBO.005	IGT Integrasi Spasial-Statistik Wilayah Jawa	25.840.000	25.840.000	100
CBO.011	Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru Kalimantan, Bali, Nusra	57.828.000	57.828.000	100
CBO.015	Integrasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	301.988.000	301.555.655	99.86
CBO.016	IGT Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit pada skala 1:50.000	105.228.000	105.097.124	99.88
CBO.004	Atlas Taktual Indonesia (Jawa Tengah)	379.649.000	377.943.020	99.529 9
CBO.022	Atlas Kewilayahan untuk Perencanaan Pembangunan Nasional	406.900.000	392.412.856	96.44
6449	Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial	1.019.735.000	520.423.541	51.03
BMA	Data dan Informasi Publik	1.019.735.000	520.423.541	51.03
BMA.001	Layanan Produk Eksternal Bidang Informasi Geospasial	60.362.000	57.155.200	94.69
BMA.002	Layanan Jasa Eksternal Bidang Informasi Geospasial	519.554.000	23.778.341	4.58
BMA.003	Layanan Data dan Informasi	439.819.000	439.490.000	99.93
Sumber : SAKTI, Desember 2025 ; https://sakti.kemenkeu.go.id/				

3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA KEUANGAN

Berdasarkan Tabel 3.20, pemanfaatan sumber daya keuangan DBIGT TA 2025 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik, tercermin dari tingginya persentase realisasi anggaran pada sebagian besar rincian output. Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial memiliki tingkat realisasi sebesar 92,67%, yang mengindikasikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan optimal dengan deviasi anggaran yang relatif kecil. Pada kelompok Pembinaan Penyelenggaraan IGT dan Pengguna Informasi Geospasial, hampir seluruh rincian output mencapai realisasi di atas 96%, bahkan beberapa output seperti Pembinaan Penyelenggaraan IGT, IGT Termanfaatkan, serta kegiatan pada kebijakan ketahanan bencana dan perubahan iklim mencapai realisasi mendekati 100%, menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan anggaran untuk mendukung capaian output yang direncanakan. Efisiensi yang konsisten juga terlihat pada Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, dengan hampir seluruh rincian output terealisasi di atas 99%, bahkan beberapa kegiatan mencapai 100%. Kondisi ini mencerminkan ketepatan perencanaan kebutuhan biaya, pengendalian pelaksanaan kegiatan yang baik, serta minimnya pemborosan anggaran. Realisasi yang tinggi pada output strategis seperti IGT Bahaya Banjir, integrasi spasial-statistik, karbon biru, dan atlas kewilayahan menunjukkan bahwa alokasi anggaran dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan produk IGT prioritas nasional.

Penggunaan anggaran yang efisien di Deputi Bidang IGT melalui mekanisme satu pintu. Makna dari satu pintu yaitu setiap pengajuan dan pengeluaran anggaran harus memperoleh persetujuan dari pejabat struktural setingkat Eselon II dan Pejabat Pembuat Komitmen. Mekanisme ini untuk mengurangi inefisiensi anggaran yang tidak diinginkan. Persetujuan anggaran didasarkan atas substansi kegiatan yang diajukan oleh penanggung jawab sub kegiatan sehingga tujuan penganggaran berbasis kinerja dapat tercapai. Penganggaran Deputi Bidang IGT berbasis online, terpadu dengan sistem penganggaran di BIG. Pemantauan anggaran dan penyerapan dapat dilakukan setiap saat melalui desktop online maupun via gawai.

Pengawasan keuangan yang ketat dilakukan melalui sistem monitoring Deputi

Bidang IGT setiap di awal bulan. Aktivitas ini merupakan bagian dari pengawasan dan efektivitas anggaran. Deputi Bidang IGT mengarahkan agar anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan meniadakan setiap bentuk pembiayaan yang melenceng dari tujuan kegiatan. Efisiensi pembiayaan juga dapat dilihat dari bisnis proses kegiatan yang dilakukan. Beberapa bentuk efisiensi yang dilakukan lingkup DIGT antara lain, efisiensi pelaksanaan

survei dengan mengurangi jumlah personil dan hari survei, perubahan skema paket meeting menjadi bimbingan teknis dan workshop di K/L walidata terkait.

Namun demikian, efisiensi sumber daya keuangan belum merata pada semua kegiatan, khususnya **Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial**, yang hanya mencapai realisasi **51,03%**. Rendahnya realisasi ini terutama dipengaruhi oleh sangat kecilnya penyerapan pada output Layanan Jasa Eksternal Bidang Informasi Geospasial yang hanya mencapai **4,58%**, meskipun output lain dalam program yang sama menunjukkan realisasi tinggi di atas **94%**. Rendahnya pendapatan PNBP dari Layanan Jasa Produk dan Jasa Eksternal Bidang Informasi Geospasial (PNBP) berimbang pada rendahnya penggunaan dana PNBP sebagaimana ditetapkan di DIPA BIG. Sesuai dengan izin penggunaan, BIG diperkenankan menggunakan dana PNBP maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen). Layanan Jasa Eksternal yang selama ini didominasi oleh kerja sama dengan pemerintah daerah (kota atau kabupaten), sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena untuk layanan jasa yang berasal dari kerja sama, estimasi pendapatan PNBP berdasar *cost recovery*, yang berarti biaya yang keluar adalah biaya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tidak ada nilai lebih atau kurang. Jika diblokir, sebagian atau seluruhnya, maka layanan jasa kerja sama tidak mungkin dapat direalisasikan karena adanya blokir anggaran. Pada semester ke-2 (kedua) terdapat kebijakan relaksasi terhadap penggunaan dana PNBP. Secara teknis kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial berdasar kerja sama yang membutuhkan waktu kurang lebih 4-6 bulan, tidak mungkin dilakukan. Jadi, meskipun tersedia anggaran untuk penggunaan dana PNBP, tidak dapat direalisasikan karena tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya. Kendala pelaksanaan yang disebabkan faktor eksternal sangat memengaruhi penyerapan anggaran, sehingga berimplikasi pada rendahnya efisiensi keuangan pada program tersebut secara agregat.

Secara keseluruhan, efisiensi sumber daya keuangan DBIGT TA 2025 tergolong **tinggi**, dengan mayoritas anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output sesuai rencana. Ke depan, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap program dengan realisasi rendah agar perencanaan anggaran semakin adaptif, realistis, dan selaras dengan dinamika kebutuhan layanan, sehingga efisiensi penggunaan APBN dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.5 KINERJA LAIN-LAIN

3.5.1 Monitoring dan Evaluasi Deputi IGT

Monitoring dan Evaluasi Deputi IGT dilaksanakan setiap tiga bulan sekali yang dipimpin oleh Deputi Bidang IGT Bersama seluruh jajaran direktur dan staf di masing-masing direktorat.

Adapun pembahasan yang dilakukan pada monitoring dan evaluasi ini yaitu terkait capaian kinerja, realisasi fisik, realisasi anggaran, kegiatan di tiap direktorat serta kendala dan hambatan yang dihadapi selama kegiatan. Selama tahun 2025 kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama empat kali yaitu pada :

- Rabu, 16 April 2025
- Selasa, 8 Juli 2025
- Senin, 6 Oktober 2025
- Rabu, 17 Desember 2025

Adapun dokumen notulen, presensi dan undangan terdapat pada folder berikut :
<https://drive.google.com/drive/folders/19ZCm0RpXtmugJGaD7VatahbWkduyZXw6?usp=sharing>

3.5.2 Integrasi Informasi Geospasial Tematik untuk Penguasaan Lahan

Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan

Laporan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik tahun 2025 yang disusun oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) ini berfokus pada integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk menangani penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, sebuah langkah strategis untuk menindaklanjuti temuan audit BPKP tahun 2023 terkait permasalahan tata kelola yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara. Program ini secara khusus mendukung tugas Satgas Sawit dan Satgas PKH dalam menertibkan pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan pendapatan negara melalui pajak maupun denda administratif. Hingga akhir tahun 2025, BIG berhasil melampaui seluruh target rencana aksi, yang meliputi penyusunan 3 modul kerja sebagai standar operasional, kompilasi data terhadap 2.145 subjek hukum, serta pelaksanaan pra-verifikasi dan verifikasi IGT yang mencakup luasan lahan masing-masing lebih dari 1,6 juta hektar. Melalui metodologi yang ketat—mulai dari analisis awal, klarifikasi dengan subjek hukum, hingga pemasangan plang penguasaan kembali di lapangan—kegiatan ini telah menghasilkan dampak signifikan berupa pemulihan aset negara dengan nilai estimasi mencapai Rp150 Triliun dari total 3,31 juta hektar lahan yang berhasil dikuasai kembali. Selain itu, inisiatif ini memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara dengan perolehan nilai kontrak sebesar Rp3,214 Triliun dan potensi denda administratif awal sebesar 14 triliun rupiah, serta mendukung pemulihan fungsi ekologis pada kawasan konservasi penting seperti Taman Nasional Tesso Nilo yang telah mengalami degradasi luas. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia untuk verifikasi lapangan, laporan ini merekomendasikan penguatan basis data melalui

teknologi citra satelit dan percepatan penertiban melalui patroli terpadu guna menjamin keberlanjutan lingkungan serta kepastian hukum di sektor perkebunan.

3.5.3 Integrasi Pertambangan dan Kawasan Hutan

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik tahun 2025 ini mendokumentasikan peran strategis Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam mendukung integrasi data pertambangan dan kawasan hutan guna memperbaiki tata kelola perizinan serta mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sebagai bagian penting dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), BIG menyediakan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala besar 1:5.000 untuk wilayah Pulau Sulawesi sebagai referensi utama dalam mengidentifikasi area bukaan tambang yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Hingga akhir triwulan keempat tahun 2025, BIG berhasil melampaui target rencana aksinya dengan mengidentifikasi luasan indikasi bukaan tambang tanpa izin PPKH seluas 8.081 hektar, atau mencapai 101% dari target awal sebesar 8.000 hektar, di mana temuan luasan terbesar terkonsentrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Proses pelaksanaan dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan data, analisis spasial tumpang susun (*overlay*), pra-verifikasi menggunakan data resmi pemerintah, hingga verifikasi lapangan bersama 218 subjek hukum untuk memastikan transparansi sebelum dilakukan penguasaan kembali lahan oleh negara melalui pemasangan plang. Implementasi kebijakan ini memberikan dampak signifikan berupa kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan fungsi ekologis hutan, serta optimalisasi pendapatan negara melalui pengenaan denda administratif atas pemanfaatan lahan yang tidak sah. Sebagai langkah keberlanjutan, laporan ini merekomendasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) formal guna menjamin konsistensi dan akuntabilitas kerja sama lintas kementerian/lembaga dalam menangani konflik pemanfaatan ruang di masa mendatang

3.5.4 Penyusunan Rencana Aksi Informasi Geospasial (Renaksi IG)

Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Informasi Geospasial merupakan langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan implementasi pengelolaan informasi geospasial secara terstruktur dan berkelanjutan. Renaksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi geospasial yang dihasilkan memenuhi standar kualitas, dapat diakses dengan mudah, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dengan adanya rencana aksi yang terarah, pengelolaan informasi geospasial diharapkan semakin optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berbasis data akurat dan terpercaya. Bentuk Kegiatan ini adalah berkomunikasi dengan mengkonfirmasi secara bertahap kepada seluruh

kementerian/lembaga terkait kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial yang akan dilaksanakan pada masing masing kementerian/lembaga pada tahun 2025 - 2029.

3.5.5 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik: Tema Pengentasan Kemiskinan

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ini menguraikan kontribusi strategis Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Fokus utama dari inisiatif ini adalah optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—sebuah sistem data terintegrasi yang menggabungkan P3KE, DTKS, dan REGSOSEK—dengan cara memastikan ketersediaan penandaan geografis (*geotagging*) atau informasi koordinat yang saat ini masih belum tersedia secara memadai karena data yang ada umumnya hanya berupa alamat dengan format yang bervariasi. Sepanjang triwulan keempat tahun 2025, Kelompok Kerja (Pokja) Pengentasan Kemiskinan BIG telah melaksanakan serangkaian koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait seperti BPS, Kemenko PM, dan Kementerian Sosial untuk membahas mekanisme akses dan peningkatan kualitas data. Dalam proses identifikasi, tim menemukan tantangan teknis pada data dari Kemenko PM yang tidak memiliki atribut koordinat dan alamat yang sulit diterjemahkan secara valid, serta data dari Kemensos yang awalnya memiliki titik koordinat tidak akurat (seperti berada di lautan), meski kemudian telah dilakukan perbaikan data yang dilengkapi alamat pada akhir November 2025. Melalui metode agregasi data pada level desa di 38 provinsi, BIG berhasil menyajikan analisis simulasi sebaran keluarga kategori desil 1 yang menunjukkan bahwa konsentrasi masyarakat miskin secara dominan berada di Pulau Jawa dan Sumatera, di mana hampir seluruh desa di Pulau Jawa memiliki lebih dari 125 keluarga desil 1. Implementasi informasi geospasial ini dinilai sangat krusial karena memberikan nilai tambah dalam mengidentifikasi kantong kemiskinan secara presisi hingga titik bangunan, menganalisis aksesibilitas terhadap pelayanan dasar seperti sekolah dan puskesmas, serta memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial tanpa adanya duplikasi program. Sebagai penutup, laporan menekankan bahwa integrasi data geospasial dan DTSEN merupakan fondasi penting bagi perencanaan kebijakan berbasis bukti, namun terdapat tantangan signifikan berupa belum tersedianya dukungan anggaran dan kegiatan spesifik di BIG untuk periode 2025—2029 yang perlu segera diatasi agar program ini dapat berjalan lebih optimal.

3.5.5 Reward and Punishment

Reward dan punishment adalah dua konsep yang digunakan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam berbagai konteks,

seperti pendidikan, manajemen, dan psikologi. *Reward* merujuk pada pemberian penghargaan, apresiasi, atau imbalan positif kepada seseorang ketika ia menunjukkan perilaku, kinerja, atau pencapaian yang sesuai dengan harapan atau standar yang telah ditetapkan, sehingga perilaku tersebut cenderung diulang dan diperkuat. Sebaliknya, *punishment* adalah pemberian konsekuensi atau sanksi negatif terhadap perilaku yang tidak diinginkan, melanggar aturan, atau tidak memenuhi standar, dengan tujuan mengurangi atau menghentikan munculnya perilaku tersebut di masa mendatang.

Dalam perspektif psikologi behavioristik, *reward* sering dikaitkan dengan reinforcement positif, yaitu penambahan stimulus yang menyenangkan setelah suatu perilaku muncul, sedangkan *punishment* berkaitan dengan pemberian atau penguatan stimulus yang tidak menyenangkan guna menekan perilaku tertentu. Dalam praktik manajemen dan pendidikan, kedua konsep ini dirancang secara sistematis dalam bentuk sistem penghargaan dan sanksi, seperti bonus, pengakuan, teguran, atau hukuman disiplin, agar perilaku individu selaras dengan tujuan organisasi atau tujuan pembelajaran. Jika diterapkan secara proporsional, konsisten, dan adil, *reward* dan *punishment* dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk perilaku positif, meningkatkan motivasi, dan menegakkan kedisiplinan tanpa mengabaikan aspek etika dan perkembangan psikologis individu

3.5.5.1 Penghargaan Best Employee of The Year dan Best PIC of the Year DISIGT

Dalam rangka mengapresiasi dedikasi dan kinerja unggul, Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik menganugerahkan penghargaan *Best Employee of The Year* dan *Best PIC of The Year* kepada pegawai terbaik di lingkup internal. Penghargaan *Best Employee of The Year* diberikan kepada individu yang menunjukkan komitmen, profesionalisme, dan kontribusi luar biasa dalam mendukung pencapaian tujuan direktorat. Sementara itu, penghargaan *Best PIC of The Year* diberikan kepada penanggung jawab kegiatan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan efektif, inovatif, dan penuh tanggung jawab. Dengan penghargaan ini, diharapkan semakin memotivasi seluruh pegawai untuk terus berprestasi dan berkontribusi dalam pengelolaan serta integrasi informasi geospasial tematik yang lebih baik. Peraih *Best Employee of The Year* adalah Puspa Kusuma Wardani dan *Best PIC of the Year* adalah Theresia Retno Wulan.



Gambar 3.21 Penghargaan Best Employee of The Year dan Best PIC of the Year DISIGT

3.5.5.2 Seleksi Pegawai Inspiratif

Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan seleksi Pegawai Inspiratif sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai yang menunjukkan dedikasi, inovasi, dan kontribusi luar biasa dalam pekerjaannya. Dalam proses seleksi yang ketat, Doddy Mendro Yuwono pegawai Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial, Puspa Kusumawardani pegawai Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, dan Yusuf Wibisono pegawai Direktorat Pemetaan Tematik, berhasil lolos ke Tahap II. Keberhasilannya mencerminkan komitmen dan kerja kerasnya dalam mendukung penyelenggaraan, integrasi serta sinkronisasi informasi geospasial tematik, dan penggunaan informasi geospasial yang bermanfaat bagi berbagai sektor. Dengan pencapaian ini, diharapkan semakin menginspirasi rekan kerja lainnya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan informasi geospasial yang lebih akurat dan terintegrasi.

Lampiran Pengumuman

Nomor : 18.1/SETTAMA/KP.03.03/12/2025

Tanggal : 18 Desember 2025

**DAFTAR PESERTA MEMENUHI SYARAT ATAU LOLOS SELEKSI TAHAP II
(ADMINISTRASI)**

NO.	NAMA	UNIT KERJA
1.	Doddy Mendro Yuwono	Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial
2.	Desi Afrina	Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
3.	Noor Asyhadi	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
4.	Puspa Kusumawardani	Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik
5.	Dyah Pangastuti	Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai
6.	Yusuf Wibisono	Direktorat Pemetaan Tematik
7.	Indah Khurotul Aini	Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial
8.	Dede Setiadi	Inspektorat
9.	Adnan Aditya Putra	Direktorat Sistem Referensi Geospasial
10.	Ratih Kusumawardani	Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial
11.	Alwidya Angga Safitri	Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial
12.	Suryanto	Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat
13.	Dwi Purnasari	Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi
14.	Aris Haryanto	Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial

Gambar 3. 12 Lampiran Daftar Pegawai Inspiratif yang Lolos Tahap II

3.5.5.3 *Punishment* untuk Staf dengan Potongan Tunjangan Kinerja terbesar

Secara umum *punishment* adalah hukuman atau sanksi yang diberikan sebagai respon terhadap pelanggaran aturan atau perilaku yang tidak diinginkan. Tujuan *punishment* adalah mencegah pengulangan perilaku negatif, meningkatkan disiplin, mengarahkan individu untuk memahami kesalahan dan memperbaikinya.

Di dalam perjalanannya, banyak sekali dinamika dalam pekerjaan yaitu terkait tindakan tertib dan disiplin sehari-hari. Salah satu contohnya adalah presensi yang dilakukan oleh masing-masing individu. Bagi yang memiliki banyak kekurangan jam kerja dikarenakan tidak presensi maka akan mendapatkan sanksi berupa potongan tunjangan kinerja. Untuk menghindari hal ini, di unit IGT melakukan *punishment* bagi individu dengan potongan tunjangan kinerja tertinggi sebagai reminder pada WhatsApp Group untuk mengingatkan absen setiap hari, hingga periode perhitungan tunjangan kinerja selanjutnya keluar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ketertiban, ketaatan individu terhadap aturan kerja. Selain itu,

hal ini dilakukan untuk merubah budaya kerja yang lebih solid dimana kita dapat mengingatkan satu sama lain untuk kebaikan bersama.



Gambar 3. 13 Nota Dinas Pemberian Reward and Punishment di Kedeputan IGT

3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Unit Kerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2025

Berdasarkan Surat dari Inspektur Badan Informasi Geospasial Nomor : B-14.3/DIGT/AW.05/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Penyampaian Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang IGT terdapat beberapa rekomendasi kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik untuk memperhatikan dan melakukan perbaikan pada komponen yang dinilai, meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal.

Pada Triwulan 4 Tahun 2025, melalui Nota Dinas PIh. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik NOMOR: B-14.3/DIGT/AW.05/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 telah disampaikan sebagian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2025 ([NodinTindakLanjutRekomendasiIGT2025](#))

Untuk tindak lanjut keseluruhan rekomendasi LAKIN IGT 2025 sebagai berikut:

FORM MATRIKS PELAKSANAAN RENCANA AKSI

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Nama Unit Kerja : (Deputi Informasi Geospasial Tematik)

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian	Status/Kemajuan Penyelesaian (disertai dengan tautan data dukung tindak lanjut)
Komponen Perencanaan Kinerja					
1	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi terkait data dukung latar belakang adanya ketidakselarasan beberapa target pada PK Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik dengan target pada Renstra Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik termasuk Hasil Reviu Target Renstra Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik yang dilakukan pada Desember 2022 yaitu pada IKP 1.1, IKP 1.2, dan IKP 1.4	Melakukan koordinasi dengan Biro PSDMO untuk memperbaiki ketidakselarasan target pada PK dan Renstra	30 Oktober 2025	30 Oktober 2025	PK 2025 signed
2	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi terkait indikator kinerja yang belum didukung dengan anggaran yang memadai dan aktivitas yang ditetapkan dengan RO (jika ada), seperti yang terjadi pada IKP 3 Persentase (%) IGT Strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P	Melakukan koordinasi dengan Biro PSDMO dan Unit kerja terkait untuk IKP yang tidak dianggarkan	30 Oktober 2025	30 Oktober 2025	Manual IKU DIGT 2025
3	Mendokumentasikan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan menguraikan tabel rencana aksi yang berisi kendala, hambatan, dan aksi yang akan dilakukan. Pada monev periode berikutnya, tabel rencana aksi ini	Melakukan monev baik pada Unit Kerja Eselon I dan II serta memperbaiki sesuai arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 2. Monev Deputi IGT dilakukan setiap awal triwulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 3. Monev Deputi IGT dilakukan 	Monev DAPIG 2025 Monev DIGT

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian	Status/Kemajuan Penyelesaian (disertai dengan tautan data dukung tindak lanjut)
	dilakukan pemantauan atas relisasi rencana aksi yang telah dilakukan. Demikian seterusnya, proses pemantauan atas realisasi rencana aksi dilakukan secara berulang setiap kali monitoring dan evaluasi dilaksanakan.			setiap awal triwulan	
Komponen Pengukuran Kinerja					
1	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi terkait pemutakhiran SOP Standar Evaluasi Pelaporan Kinerja Kegiatan dan Anggaran	Melakukan Koordinasi dengan Biro PSDMO terkait pemutakhiran SOP tersebut	30 November 2025	30 November 2025	
2	Mendokumentasikan keterlibatan seluruh pimpinan (termasuk Eselon II) pada Deputi IGT dalam pengambilan keputusan strategis dalam kegiatan monitoring dan evaluasi triwulanan	Melakukan Monev rutin dengan menghadirkan direktur dan mendokumentasikan nya serta mencatat pada notulen dengan baik	4. Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 5. Monev Deputi IGT dilakukan setiap awal triwulan	6. Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 7. Monev Deputi IGT dilakukan setiap awal triwulan	Monev DAPIG 2025 Monev DIGT
3	Menambahkan informasi mengenai darimana efisiensi anggaran diperoleh, yaitu dari perbaikan aktivitas IKP yang mana dan berapa jumlah/persentase efisiensi yang diperoleh		30 November 2025	30 November 2025	
Komponen Pelaporan Kinerja					
1	Menambahkan informasi yang memadai mengenai analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, target jangka menengah, dan level internal BIG/nasional/internasional, untuk melengkapi perbandingan dan penyampaian informasi terkait capaian kinerja	Melakukan analisis terkait capaian multi years pada setiap jenjang, tahun dan dilengkapi perbandingan pada lakin	30 November 2025	30 November 2025	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian	Status/Kemajuan Penyelesaian (disertai dengan tautan data dukung tindak lanjut)
	yang telah disampaikan pada Laporan Kinerja;				
2	Meningkatkan kepedulian pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja, yaitu melalui partisipasi aktif pegawai (dibuktikan dengan dokumentasi yang valid) pada kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala yang dilaksanakan di lingkungan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik	Melakukan Monev rutin dengan menghadirkan seluruh staf mendokumentasikan nya serta mencatat pada notulen dengan baik serta mencantumkan daftar hadir	8. Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 9. Monev Deputi IGT dilakukan setiap awal triwulan	10. Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 11. Monev Deputi IGT dilakukan setiap awal triwulan	Monev DAPIG 2025 Monev DIGT
Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal					
1	Melakukan pemantauan secara berkala serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	Melakukan Monev rutin dengan menghadirkan direktur dan mendokumentasikan nya serta mencatat pada notulen dengan baik	12. Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 13. Monev Deputi IGT dilakukan setiap awal triwulan	14. Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 15. Monev Deputi IGT dilakukan setiap awal triwulan	Monev DAPIG 2025 Monev DIGT
2	Mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian target kinerja, baik capaian kinerja output maupun capaian kinerja outcome	Melakukan Monev rutin dengan menghadirkan direktur dan mendokumentasikan nya serta mencatat pada notulen dengan baik	16. Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 17. Monev Deputi IGT dilakukan setiap awal triwulan	18. Monev UKE II dilakukan setiap akhir bulan. 19. Monev Deputi IGT dilakukan setiap awal triwulan	Monev DAPIG 2025 Monev DIGT

Sumber : [Form TL Evaluasi AKIN IGT 2025.docx](#)

BAB 4 PENUTUP



Laporan Kinerja Deputi Informasi Geospasial Tematik Tahun Anggaran 2025 ini merupakan refleksi atas capaian, tantangan, serta upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan informasi geospasial tematik secara optimal. Sepanjang tahun 2025, berbagai program dan kegiatan strategis telah dilaksanakan guna memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas informasi geospasial, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional.

Meskipun telah banyak capaian positif yang diraih, masih terdapat tantangan yang perlu terus diatasi, seperti peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan infrastruktur data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi geospasial. Oleh karena itu, komitmen dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas serta pemanfaatan informasi geospasial untuk pembangunan nasional.

Ke depan, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan inovasi dalam penyediaan serta pemanfaatan data geospasial. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan menjadi fokus utama guna memastikan bahwa informasi geospasial yang dihasilkan semakin akurat, dapat diakses dengan mudah, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi berbagai sektor.

Akhir kata, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja tahun 2025. Semoga sinergi dan komitmen yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi mendukung pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis data geospasial yang handal.